



**ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI  
BERBASIS AKRUAL (SAIBA) DALAM PENYAJIAN LAPORAN  
KEUANGAN PADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEHUTANAN**

Skripsi

Diajukan oleh:

Rifa Aulia Suherman  
022116133

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS PAKUAN  
BOGOR**

**2021**

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI  
BERBASIS AKRUAL (SAIBA) DALAM PENYAJIAN LAPORAN  
KEUANGAN PADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi  
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan  
Bogor

Mengetahui,



Dekan Fakultas Ekonomi

(Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA.)

Ketua Program Studi

(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA.,  
CSEP., QIA., CGCAE.)

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI  
BERBASIS AKRUAL (SAIBA) DALAM PENYAJIAN LAPORAN  
KEUANGAN PADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN**

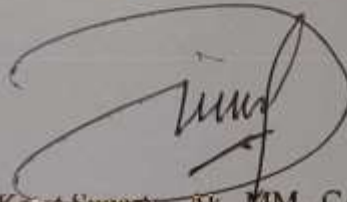
Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus  
Pada Hari: Sabtu, Tanggal 30 Januari 2021

Rifa Aulia Suherman  
022116133

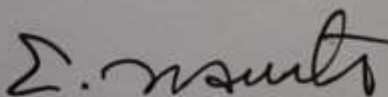
Menyetujui,

Ketua Sidang Penguji



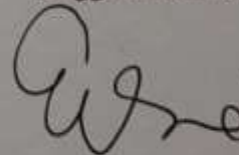
(Ketua Sidang Penguji, Ak., MIM., CA., PIA)

Ketua Komisi Pembimbing



(Emadhi Sudarmanto, Ak., M.M., M.Ak., CFE.,  
CFrA., CA., QIA., CGCAE.)

Anggota Komisi Pembimbing



(Dessy Herlisnawati, S.E., M.Si.)

**NOMOR : 73/KEP/REK/IX/2020**  
**TENTANG : PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER**  
**INFORMASI SERTA PELIMPAHAN KEKAYAAN**  
**INTELEKTUAL DI UNIVERSITAS PAKUAN**

---

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rifa Aulia Suherman  
NPM : 022116133  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis  
Akrual (SAIBA) Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka dibagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten dan Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Februari 2021

Rifa Aulia Suherman

022116133

**© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, tahun 2020**  
**Hak Cipta dilindungi Undang-undang**

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.*

*Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.*

## ABSTRAK

Rifa Aulia Suherman NPM 022116133. Skripsi berjudul “Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Studi Kasus: Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).” Pembimbing Bapak Ernadhi Sudarmanto, Ak., M.M., M.Ak., CFE., CFrA., CA., QIA., CGCAE dan Ibu Dessy Herlisnawati, S.E., M.Si

Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan (1) Untuk menjelaskan penerapan SAIBA pada Kementerian LHK (2) Untuk menjelaskan penyajian laporan keuangan pada saat sebelum menggunakan SAIBA dan setelah menggunakan SAIBA pada Kementerian LHK. Penelitian ini dilakukan pada Kementerian LHK Jakarta Pusat. Jenis data yang diteliti adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa laporan keuangan pada saat setelah menggunakan aplikasi SAIBA ini menjadi lebih meningkat signifikan dibandingkan dengan sebelum menggunakan SAIBA. Laporan keuangan yang tersaji pun menjadi lebih akurat dan lebih transparan, dan perubahan data menjadi lebih terkendali pada saat menggunakan aplikasi ini. Diantaranya tercermin dari opini BPK yang menunjukkan perkembangan positif dari tahun ke tahun. Dengan adanya pengakuan dari BPK merupakan citra yang baik untuk meningkatkan penilaian dan kepercayaan publik atas kualitas, kredibilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah.

Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memahami sistem untuk menyusun laporan keuangan belum sepenuhnya dimiliki oleh setiap Satker, kurangnya pegawai yang berlatarbelakang pendidikan ekonomi khususnya akuntansi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pelatihan akuntansi berpengaruh terhadap implementasi akuntansi berbasis akrual. Semakin memadai pelatihan akuntansi yang dilakukan, maka semakin mendukung dan meningkatkan implementasi akuntansi berbasis akrual.

**Kata kunci:** Laporan Keuangan, SAIBA, Sumber Daya Manusia, Pelatihan Akuntansi

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr wb. alhamdulillahirobil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan".

Adapun penulis skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan perlindungan serta nikmat kesehatan yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
2. Orang tua penulis, Bapak Suherman dan Ibu Ai Supiati yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis dalam penyusunan skripsi sehingga berjalan dengan lancar.
3. Kaka dan adikku yang selalu mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Dr. H. Bibin Rubini, M.Pd. selaku Rektor Universitas Pakuan yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian kepada penulis
5. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., C.A.,. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
6. Bapak Dr. Chaidir, S.E., MM., dan Ibu Dr. Ir. Hj. Yuary Farradia, Msc. selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
7. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
8. Ibu Retno Martanti Endah Lestari, S.E., M.Si, CMA., CAPM. Selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
9. Bapak Ernadhi Sudarmanto, Ak., M.M., M.Ak., CFE., CFrA., CA., QIA., CGCAE. Selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan semangat demi kelancaran penulisan skripsi penelitian ini.
10. Ibu Dessy Herlisnawati, S.E., M.Si. Selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan semangat demi kelancaran penulisan skripsi penelitian ini.
11. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan.
12. Drs. Nadiful Alim, AK. M.Si Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Kementerian LHK yang telah memberikan data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Mas Ivan yang telah banyak membantu saya selama menyelesaikan skripsi ini.

14. Teman-temanku: Riri Siskia, Wira Ade Putra, Mega Mayangsari dan Novia Yulistiani yang telah memberikan semangat dan dukungan selama penulisan skripsi penelitian ini.
15. Seluruh teman-teman kelas C dan D Akuntansi angkatan 2016 yang memberikan dukungan dan semangat selama perkuliahan.
16. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu oleh penulis, namun tidak mengurangi rasa terima kasih penulis.

Semoga semua doa, bantuan, dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, semoga skripsi penelitian ini memberikan manfaat bagi seluruh pembaca.

Bogor, Januari 2021

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN PRODI</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN</b> .....	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA</b> ....	iv
<b>HAK CIPTA</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	6
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	6
1.2.2 Perumusan masalah.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian .....	7
1.3.1 Maksud Penelitan.....	7
1.3.2 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
2.1 Akuntansi Sektor Publik.....	8
2.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik .....	8
2.1.2 Tujuan Akuntansi Sektor Publik.....	8
2.1.3 Standar Akuntansi Sektor Publik.....	9
2.1.4 Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SKPN).....	10
2.2 Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA).....	11
2.2.1 Pelatihan Pengguna SAIBA.....	11

2.2.2	Komitmen Organisasi .....	14
2.2.3	Kebenaran dan Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan .....	15
2.2.4	Pengertian Sistem Akuntansi .....	16
2.2.5	Basis Akuntansi Pemerintah .....	16
2.2.6	Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA) .....	19
2.2.7	Tujuan dan Manfaat Basis AkruaI .....	25
2.3	Laporan Keuangan .....	26
2.4	Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran.....	31
2.4.1	Penelitian Sebelumnya.....	31
2.4.2	Kerangka Pemikiran.....	34
2.4.3	Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Kementerian LHK.....	34
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
3.1	Jenis Penelitian .....	37
3.2	Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian .....	37
3.2.1	Objek Penelitian.....	37
3.2.2	Unit Analisis Penelitian .....	37
3.2.3	Lokasi Penelitian.....	37
3.3	Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	38
3.4	Operasionalisasi Variabel.....	38
3.5	Metode Pengumpulan Data .....	38
3.5.1	Jenis Data Yang Digunakan .....	39
3.6	Metode Penarikan Sampel.....	39
3.7	Metode Pengolahan /Analisis Data .....	40
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>42</b>
4.1	Gambaran Umum Tentang Kementerian LHK .....	42
4.1.1	Latar Belakang Pembentukan Instansi .....	42
4.1.2	Gambaran Umum Lingkungan Hidup dan Kehutanan .....	43
4.1.3	Struktur Organisasi .....	47
4.2	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.....	49
4.2.1	Program Kegiatan .....	51
4.3	Pembahasan .....	51

4.4	Analisis Data .....	53
4.4.1	Penerapan SAIBA Pada Kementerian LHK .....	57
4.1.2	Penyajian Laporan Keuangan Pada Saat Sebelum Menggunakan SAIBA dan Setelah Menggunakan SAIBA Pada Kementerian LHK .....	60
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>		<b>68</b>
5.1	Simpulan.....	68
5.2	Saran .....	68
5.2.1	Bagi Entitas Pelaporan KLHK.....	69
5.2.2	Bagi Peneliti yang Melakukan Penelitian Sejenis .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>70</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Strategi Penerapan SAP Berbasis AkruaI Secara Bertahap .....	24
Tabel 2.2	Penelitian terdahulu .....	31
Tabel 3.1	Jenis, Metode dan Teknik Penelitian.....	37
Tabel 3.2	Operasional Variabel.....	38
Tabel 4.1	Rincian Struktur Organisasi Eslon 1 Lingkup KLHK .....	47
Tabel 4.2	Rekapitulasi Jumlah Satker Menurut Eslon 1 .....	49
Tabel 4.3	Hasil Penelitian .....	54

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Siklus Standar Akuntansi Sektor Publik.....	9
Gambar 2.2	Kerangka Pemikiran .....	36
Gambar 4.1	Tampilan Aplikasi SAIBA versi 2019 .....	53
Gambar 4.2	Belajar Mengetahui Isi Dari Aplikasi SAIBA .....	61
Gambar 4.3	Tampilan Menu Aplikasi SAIBA .....	67

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Hasil Wawancara .....	76
------------------------------------	----

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Penelitian

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prinsip pokok bagi pemerintah di suatu negara, salah satunya adalah di Indonesia. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas adalah bentuk dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan adalah cara menguatkan standar, sistem, sumber daya aparatur dan kelembagaan.

Wacana tentang *good governance* pada organisasi pemerintahan atau yang disebut dengan *good government governance* merupakan isu yang paling mengemuka pada era reformasi sampai dengan sekarang ini. Tuntutan masyarakat agar pengelolaan negara dijalankan transparan dan akuntabel sejalan dengan keinginan masyarakat internasional. Adanya dorongan yang kuat dari lembaga-lembaga internasional, kepada negara-negara di dunia untuk mengganti sistem tradisionalnya dari akuntansi berbasis kas ke sistem akuntansi berbasis akrual pada sektor pemerintahan atau swasta.

Tuntutan dari masyarakat internasional tersebut juga berdampak pada sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia. Hasilnya, pada tahun 2010, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) menerbitkan standar akuntansi berbasis akrual yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 yang menggunakan basis kas menuju akrual.

Sesuai dengan kerangka waktu implementasi SAP berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010. Tahun 2014 merupakan tahun terakhir pemerintah menggunakan basis kas menuju akrual. Dimana pada tahun 2015 Pemerintah Pusat dan Daerah harus sudah menggunakan basis akrual dalam penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan basis akrual dimaksudkan untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif dan lebih baik bagi para pemangku kepentingan baik para pengguna laporan keuangan dibandingkan dengan basis kas menuju akrual yang selama ini dianut.

Pada dasarnya, hanya terdapat dua basis akuntansi atau dasar akuntansi yang dikenal dalam akuntansi, yaitu akuntansi basis kas (*cash basic*) dan akrual (*accrual basic*). Sedangkan modifikasian atau kas menuju akrual, merupakan modifikasi diantara basis kas dan basis akrual untuk masa transisi.

Dalam akuntansi basis kas, transaksi tidak diakui atau dicatat sampai transaksi secara kas benar-benar diterima atau dikeluarkan. Apabila transaksi tersebut tidak berpengaruh terhadap kas, maka transaksi tersebut tidak akan dicatat. Sedangkan basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi.

Untuk mendukung pelaksanaan akuntansi berbasis akrual di pemerintah pusat, Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengembangkan aplikasi akuntansi yang selama ini telah digunakan dalam basis kas menuju akrual yaitu Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) menjadi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA).

Mengingat sejak tahun 2005 sampai 2014 aplikasi SAKPA telah digunakan oleh Kementerian Negara atau Lembaga dalam menyusun laporan keuangannya, sehingga dapat dikatakan semua satuan kerja telah familiar dengan aplikasi tersebut. Pengembangan SAKPA yang menjadi SAIBA merupakan terobosan aplikasi akuntansi berbasis akrual yang diharapkan memenuhi kebutuhan informasi laporan keuangan yang disyaratkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAIBA ini juga dibangun sedemikian rupa sehingga diharapkan operator SAI, Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan aplikasi SAIBA ini.

Aplikasi Sistem Akuntansi Pengguna Anggaran (SAKPA) ini dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menjadi SAIBA dan dapat menghasilkan laporan keuangan berbasis akrual berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Yang dimana pada tingkat Kementerian atau Lembaga itu terdiri dari beberapa satuan kerja (satker), dimana satuan kerja ini adalah untuk memasukan data keuangan pada aplikasi SAIBA dan diinput ke e-Rekon. SAIBA dan SIMAK tidak sama maka aplikasinya harus diupdate dan untuk mengambil datanya tidak bisa dari SAIBA offline harus dari e-Rekon.

Sistem Akuntansi Instansi berkaitan dengan kegiatan penyusunan laporan keuangan yang dilakukan instansi pemerintah, dalam hal ini laporan keuangan Kementerian atau Lembaga adalah bentuk pertanggung-jawaban atas pelaksanaan APBN berupa LRA, LO, LPE, Neraca dan CaLK. Keandalan laporan keuangan dapat diuji dengan laporan keuangan yang dihasilkan oleh Satuan Kerja (satker) dengan proses rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Dan dalam hal ini satuan kerja diwajibkan menyampaikan laporan keuangan tepat waktu pada KPPN pada setiap periode akuntansi yang telah ditentukan sebelumnya.

Perubahan basis akuntansi dari basis kas ke basis akrual disebabkan adanya beberapa hal yang tidak bisa dipenuhi oleh akuntansi berbasis basis kas. Laporan keuangan berbasis kas belum memperlihatkan kinerja pemerintah secara keseluruhan, tidak menyajikan informasi keuangan yang sesungguhnya, dan kurang memberikan rekam jejak atas perubahan nilai ekuitas pemerintah (Amiriani,2014). Akan tetapi, informasi akuntansi berbasis akrual hanya dapat disajikan secara periodik (semester dan tahunan) menyulitkan penyediaan informasi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan harus memberikan manfaat baik bagi penyusun maupun pengguna laporan keuangan sebagai dasar



pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan akuntansi berbasis akrual dimaksudkan untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif dan lebih baik bagi para pemangku kepentingan dibandingkan dengan basis kas menuju akrual.

Menurut *Internasional Financial Reporting Standard* (IFRS) Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dengan basis akrual maka informasi yang disajikan dalam laporan keuangan lebih komprehensif dibandingkan basis kas menuju akrual.

Selain itu laporan keuangan berbasis akrual juga dimaksudkan untuk memberikan manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Hal tersebut sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

Laporan keuangan Kementerian atau Lembaga (LKKL) tahun 2005-2014 dihasilkan dari Sistem Akuntansi Keuangan Pengguna Anggaran (SAKPA) dengan basis kas. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, maka sejak tahun 2015 penyusunan LKKL ini disusun dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Akuntansi berbasis akrual ini mengakui pendapatan dan belanja (biaya) bukan saat kas diterima atau dibayarkan, tetapi diakui atau dicatat pada saat transaksi terjadi.

Dengan basis akrual maka informasi yang disajikan dalam laporan keuangan lebih komprehensif dibandingkan basis kas menuju akrual. SAIBA merupakan aplikasi akuntansi pemerintah pusat yang menghasilkan laporan keuangan berbasis akrual. Karena, selama ini telah terbukti mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akuntabel. Diataranya tercermin dari opini audit BPK yang menunjukkan perkembangan positif dari tahun ke tahun.

Perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) adalah aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA). SAIBA ini dioperasikan secara berjenjang oleh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Wilayah (UAPPA-W), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Eslon 1 (UAPPA-E1), dan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA). Perekaman data dilakukan di satker (*satuan kerja*), kemudian data direkonsiliasi dengan KPPN. E-Rekon-LK digunakan untuk mengkonsolidasi data seluruh satker, untuk rekonsiliasi antara satker dengan data KPPN.

Penggunaan basis akrual, mengembangkan prinsip dan asumsi bahwa pencatatan transaksi keuangan tidak hanya dilakukan pada saat terjadi penerimaan dan pengeluaran uang. Dengan basis akrual, informasi yang diberikan kepada pemakai tidak hanya terbatas pada transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pengeluaran kas melainkan juga kewajiban yang membutuhkan penyelesaian kas

di masa depan dan informasi lain yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Menurut basis akrual pendapatan dicatat ketika pendapatan tersebut diperoleh, meskipun apabila pendapatan tersebut tidak diterima secara kas sampai jauh di masa mendatang.

Aplikasi SAIBA ini juga telah berhasil mengantarkan sebagian besar laporan keuangan Kementerian atau Lembaga mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dan laporan keuangan Pemerintahan Pusat mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian pada tahun 2015. Berdasarkan latar belakang diatas dapat diketahui bahwa implementasi akuntansi berbasis akrual merupakan hal yang baru diterapkan pada pemerintah pusat, yang memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas laporan keuangan Kementerian atau Lembaga (LKKL) yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kredibilitas pemerintah pusat, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional.

Kementerian LHK ini adalah pada masa Pemerintahan Presiden Jokowi Kementerian Lingkungan Hidup digabung dengan Kehutanan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kementerian LHK mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara dalam melaksanakan tugas termasuk dalam kaitannya dengan laporan keuangan yang dihasilkan menggunakan aplikasi SAIBA bahwasannya tidak ditemukan kecurangan dalam pencatatan ini.

Aplikasi SAIBA ini setiap tahunnya selalu terdapat perubahan, seperti perbarui sistem. Dan aplikasi SAIBA tidak akan bisa digunakan jika memasukan data laporan keuangan pada tahun sebelumnya, karena setiap tahun laporan keuangan kementerian itu di audit oleh BPKRI. Laporan keuangan hanya dapat dikoreksi sampai dengan masa audit dari BPKRI, lalu dari hasil koreksi BPKRI itu muncul laporan keuangan Audited. Maka setelah laporan keuangan Audited terbit maka data laporan keuangan tersebut merupakan data final dan tidak dapat dikoreksi lagi. Aplikasi SAIBA ini hanya dapat digunakan untuk data laporan keuangan terbaru sesuai tahun yang berjalan dan selalu setiap tahun terdapat perbaharui sistem agar dapat digunakan.

Laporan keuangan ini merupakan suatu laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan saat ini atau periode berikutnya, yang dimana hasil dari proses akuntansi dan informasi historis yang didalamnya terdapat proses identifikasi, pengukuran, dan laporan informasi ekonomi sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang tepat.

Pada Kementerian LHK dalam membuat laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi SAIBA dimana menggunakan basis akrual ini informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akan lebih komprehensif dibandingkan dengan basis kas menuju akrual. Dengan menggunakan aplikasi SAIBA ini telah terbukti mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Diantaranya tercermin dari opini BPK yang menunjukkan perkembangan positif dari tahun ke tahun. Hal ini didasarkan atas hasil reuiu BPK terhadap laporan keuangan Kementerian LHK yang

telah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 4 tahun terakhir. Adanya pengakuan dari BPK merupakan citra yang baik untuk meningkatkan penilaian dan kepercayaan publik atas kualitas, kredibilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah serta mutu kinerja aparatur pemerintah.

BPK telah mereviu laporan keuangan Kementerian LHK berupa Neraca, LRA, LO, LPE dan CALK untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Reviu ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan.

Namun dalam aplikasi SAIBA ini masih bisa terjadi salah input karena masih dilakukan secara manual. Aplikasi SAIBA belum terkoneksi langsung dengan data yang ada di Kementerian Keuangan, sehingga untuk melakukan rekonsiliasi keuangan harus melalui aplikasi E-rekon-LK.

Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual merupakan proses yang berkesinambungan dan terpadu. Dampak yang dihasilkan dari penerapan sistem ini tidak dapat dilihat dalam waktu singkat. Keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual tentu saja dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya, faktor sumber daya manusia seperti tingkat pendidikan dan latar belakang pendidikan staf, pelatihan. Sumber daya manusia dan perangkat pendukungnya memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan penerapan peraturan pemerintah.

Tetapi dalam penggunaan aplikasi SAIBA ini memiliki masalah dalam update aplikasi yang tidak sempurna, baik aplikasi persediaan, Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi (SIMAK) atau SAIBA yang dilakukan oleh satuan kerja, kemudian masalah-masalah yang ada dimonitoring E-rekon seperti, adanya satker yang belum rekon/upload ke E-rekon, adanya selisih angka antara aplikasi SAIBA dan SIMAK/Persediaan. Kemudian adanya selisih atas pendapatan, belanja, maupun kas antara satuan kerja (satker) dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melalui E-rekon. Dan kesalahan pengguna akun oleh satker baik pengguna akun belanja, maupun pendapatan.

Peralihan dari kementerian atau Lembaga dalam membuat laporan keuangan dari aplikasi SAI ke SAIBA itu terjadi pada tahun 2014 dan 2015. Dimana seluruh pemerintahan diwajibkan dalam penyusunan laporan keuangan menggunakan berbasis akrual yaitu SAIBA, karena Kementerian LHK merupakan instansi pemerintah maka wajib menggunakan aplikasi berbasis akrual. Dari uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang **“Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual dalam Penyajian Laporan Keuangan pada Kementerian LHK”**.

## **1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Sesuai dengan kerangka waktu implementasi SAP berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010. Tahun 2014 merupakan tahun terakhir pemerintah menggunakan basis kas menuju akrual. Dimana pada tahun 2015 Pemerintah Pusat dan Daerah harus sudah menggunakan basis akrual dalam penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan basis akrual dimaksudkan untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif dan lebih baik bagi para pemangku kepentingan baik para pengguna laporan keuangan dibandingkan dengan basis kas menuju akrual yang selama ini dianut.

Di dalam laporan keuangan ini yang menggunakan aplikasi SAIBA untuk menghasilkan laporan-laporan seperti Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, Neraca, dan untuk pelaporan tahunan, Laporan Keuangan tersebut harus dilengkapi dengan Catatan atas Laporan Keuangan. Pada tingkat Kementerian/Lembaga itu terdiri dari beberapa satuan kerja. Satuan kerja ini adalah untuk memasukan data keuangan pada aplikasi SAIBA dan diinput ke E-rekon. Dan dimana dalam laporan keuangan ini sangat berpengaruh untuk seorang auditor dalam menjalankan penugasan audit atas laporan keuangan KLHK.

SAIBA dan SIMAK tidaklah sama maka, aplikasi SAIBA ini harus diupdate dan untuk mengambil datanya tidak bisa dari SAIBA offline harus dari E-rekon. Kelemahan SAIBA ini bisa saja terjadi salah input dalam penjurnalan akun akrual, karena masih dilakukan secara manual di aplikasi SAIBA. Data yang ada dalam aplikasi SAIBA ini juga tidak langsung terkoneksi dengan data yang ada di Kementerian Keuangan, sehingga untuk melakukan rekonsiliasi keuangan harus melalui aplikasi E-rekon-LK.

Dan dalam penggunaan aplikasi SAIBA ini memiliki masalah dalam update aplikasi yang tidak sempurna, baik aplikasi persediaan, SIMAK atau SAIBA yang dilakukan oleh satuan kerja, kemudian masalah-masalah yang ada dimonitoring E-rekon seperti, adanya satker yang belum rekon/upload ke E-rekon, adanya selisih angka antara aplikasi SAIBA dan SIMAK/Persediaan. Kemudian adanya selisih atas pendapatan, belanja, maupun kas antara satker dan KPPN melalui E-rekon. Dan kesalahan pengguna akun oleh satker baik pengguna akun belanja, maupun pendapatan.

### **1.2.2 Perumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dibuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan SAIBA dalam laporan keuangan pada Kementerian LHK?
2. Bagaimana penyajian Laporan Keuangan pada saat sebelum menggunakan SAIBA dan setelah menggunakan SAIBA pada Kementerian LHK?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud penulis melakukan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi dan data yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi yaitu membuat kesimpulan mengenai “Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaL Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Kementerian LHK Tahun 2015-2019” selain itu juga sebagai upaya pengembangan dan penerapan ilmu penulis yang sudah didapatkan dibangku kuliah.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk

1. Untuk menjelaskan penerapan SAIBA dalam laporan keuangan pada Kementerian LHK
2. Untuk menjelaskan penyajian laporan keuangan pada saat sebelum menggunakan SAIBA dan setelah menggunakan SAIBA pada Kementerian LHK

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini, antara lain:

#### **1. Kegunaan Praktis**

Untuk membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada pada lokasi yang diteliti, khususnya dalam penerapan sistem akuntansi instansi berbasis akruaL dalam penyajian laporan keuangan.

#### **2. Kegunaan Akademis**

##### **a. Bagi Penulis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan acuan bagi studi ilmiah tentang analisis penerapan sistem akuntansi instansi berbasis akruaL dalam penyajian laporan keuangan serta dapat digunakan untuk menambah pengetahuan individu yang berasal dari luar perkuliahan dan menggabungkannya dengan pengetahuan yang didapat dari dunia perkuliahan.

##### **b. Bagi Pembaca**

Memberikan tambahan ilmu pengetahuan, dan wawasan khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik yang berkaitan dengan sistem akuntansi instansi berbasis akruaL dalam penyajian laporan keuangan dan sebagai referensi bagi peneliti lain yang berkeinginan melakukan penelitian sejenis.

## **BAB II**

### **TINAJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Akuntansi Sektor Publik**

##### **2.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik**

Istilah sektor publik yang memiliki pengertian yang bermacam-macam, hal ini merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (politik, ekonomi, hukum, dan social) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ekonomi sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas (kesatuan) yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Akuntansi pemerintah merupakan bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang sangat pesat. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah.

Akuntansi merupakan suatu sistem pengukuran dan sistem komunikasi untuk memberikan informasi ekonomi dan sosial atas suatu entitas yang dapat diidentifikasi sehingga memungkinkan pemakai untuk membuat pertimbangan dan keputusan mengenai alokasi sumber daya optimal dan tingkat pencapaian tujuan organisasi. Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan oleh sektor swasta, misalnya untuk menghasilkan beberapa jenis pelayanan publik seperti layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik dan lain-lain. Akan tetapi untuk tugas tertentu tugas sektor publik tidak dapat digantikan oleh sektor swasta, misalnya fungsi birokrasi pemerintahan. Sebagai konsekuensinya akuntansi sektor publik dalam beberapa hal berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta.

##### **2.1.2 Tujuan Akuntansi Sektor Publik**

Akuntansi sektor publik berkaitan dengan tiga hal, yaitu persediaan informasi, pengendalian manajemen dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik ini merupakan alat informasi bagi pemerintah maupun alat informasi bagi publik. Informasi akuntansi ini sangat bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Menurut materi kuliah akuntansi sektor publik (sudjatmiko wibowo) tujuan dari akuntansi sektor publik adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan ekonomis atas alokasi suatu sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen.
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab secara tepat dan efektif program dan penggunaan

sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas.

### 2.1.3 Standar Akuntansi Sektor Publik (SASP)

#### 1. Pengertian SASP

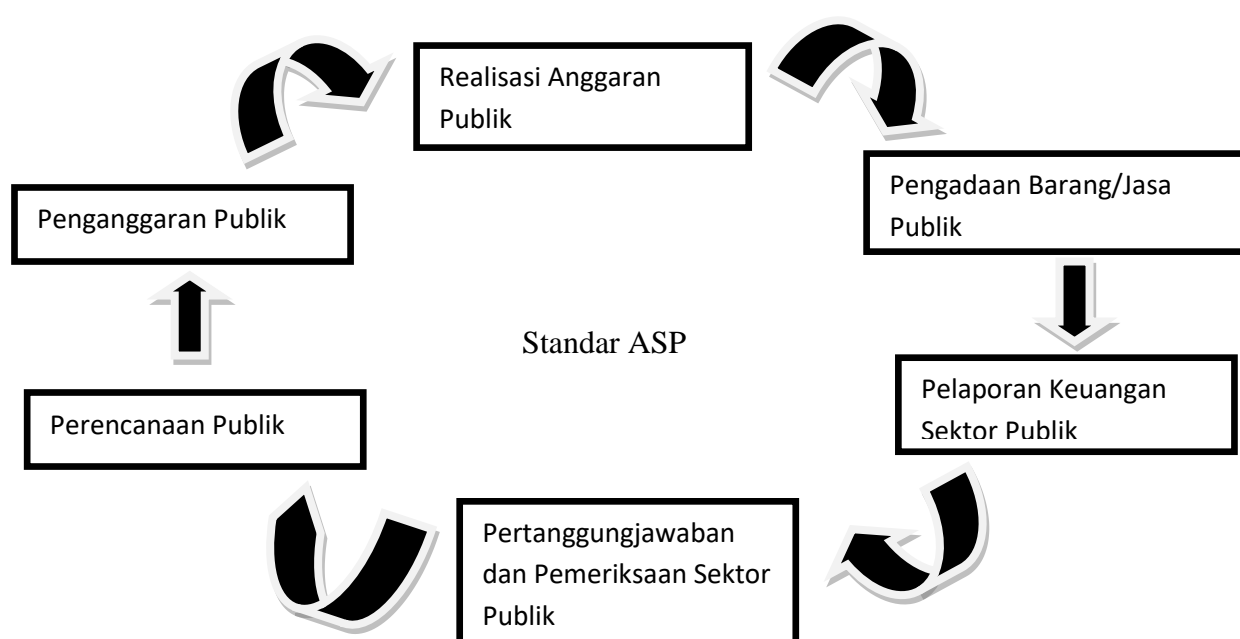
Standar akuntansi pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diimplementasikan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah yang terdiri atas LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) dan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah), dengan tujuan agar penyelenggaraan akuntansi pemerintahan menjadi transparan dan akuntabel, serta untuk meningkatkan kualitas LKPP dan LKPD (wikiapbn)

Standar Akuntansi Sektor Publik adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan organisasi sektor publik. (Bastian:2010:137) menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah merupakan suatu prinsip akuntansi yang diimplementasikan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. SAP merupakan syarat yang sangat diperlukan dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah.

#### 2. Tujuan SASP

1. Pedoman akuntansi yang diharapkan dapat diterapkan bagi pencatatan transaksi keuangan organisasi sektor publik yang berlaku dewasa ini
2. Pedoman akuntansi yang dilengkapi dengan klasifikasi rekening dan prosedur pencatatan serta jurnal standar yang telah disesuaikan dengan siklus kegiatan organisasi sektor publik, yang mencakup penganggaran, perbendaharaan dan pelaporannya.

#### 3. Siklus SASP



### Gambar 2.1 Siklus ASP

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. SAP terdiri atas sebuah kerangka konseptual dan 11 pernyataan.

1. PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan
2. PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran
3. PSAP 03 Laporan Arus Kas
4. PSAP 04 Catatan atas Laporan keuangan
5. PSAP 05 akuntansi Persediaan
6. PSAP 06 Akuntansi Investasi
7. PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap
8. PSAP 08 Akuntansi Kontruksi Dalam Pengerjaan
9. PSAP 09 Akuntansi Kewajiban
10. PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Peristiwa Luar Biasa
11. PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian

#### **2.1.4 Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)**

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar ini merupakan acuan bagi auditor perintah dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemeriksa. SPKN hanya mengatur hal-hal yang belum diatur oleh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). SPKN ini ditetapkan dengan peraturan BPK No. 01 tahun 2007 sebagai amanat UU 15 tahun 2004. Sejak ditetapkannya Peraturan BPK ini dimuatnya dalam Lembaran Negara, SPKN ini akan mengikat BPK maupun pihak lain yang melaksanakan pemeriksaan keuangan negara untuk dan atas nama BPK.

Tujuan dari SPKN ini adalah untuk menjadi ukuran mutu bagi para pemeriksa dan organisasi pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara. Pemeriksa ini juga memiliki tanggung jawab secara profesi dalam melaksanakan dan melaporkan hasil pemeriksaan sebagaimana diatur dalam SPKN. Dimana SPKN ini digunakan oleh:

1. Badan Pemeriksa Keuangan RI
2. Akuntan publik atau pihak lainnya yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara untuk dan atas nama BPK RI
3. Penyusun standar pemeriksa sesuai dengan kedudukan, tugas pokok, dan fungsi masing-masing.
4. Pihak-pihak lain yang ingin menggunakan SPKN.

Tujuan laporan keuangan sektor publik, berbeda dengan sektor swasta. Laporan keuangan sektor swasta mempunyai tujuan untuk mengukur laba, sedangkan tujuan laporan sektor publik menurut Government Accounting Standard Board (2009:54) ada;ah sebagai berikut:

1. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan fungsinya



2. Melaporkan hasil operasi
3. Melaporkan kondisi keuangan
4. Melaporkan sumber daya jangka panjang

Secara umum para pengguna laporan keuangan sektor publik memerlukan informasi yang dapat membantunya untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi, sosial dan politik dan mengadakan evaluasi atas penggunaan sumber-sumber oleh pemerintah. Akuntansi pemerintah (termasuk akuntansi untuk lembaga nonprofit pada umumnya) merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk tidak mencari laba.

## **2.2 Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA)**

### **2.2.1 Pelatihan Pengguna SAIBA**

Penerapan akuntansi berbasis akrual menjadi tantangan bagi semua pihak dalam menjalankan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Penerapan ini juga berlaku pada Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Dalam pelaksanaannya Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat terdiri dari dua sistem utama, yaitu Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) diselenggarakan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) diselenggarakan oleh Departemen atau Lembaga non Departemen. (Sari Zawitri:2015).

Penyelenggaraan pemerintahan perlu didukung oleh sistem pengelolaan keuangan yang cepat, tepat, dan akurat. Dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 36 ayat 1 tentang Keuangan Negara dituliskan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Sebagai bentuk keberlanjutan usaha kebijakan pengelolaan keuangan negara, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2010 untuk mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

Lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi SAP Berbasis AkruaI dan SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI. SAP Berbasis AkruaI berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI berlaku selama transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis AkruaI. Penerapan SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI dapat dilaksanakan selama jangka waktu 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010 yaitu sampai Tahun Anggaran 2014. Selanjutnya, setiap entitas pelaporan, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah wajib melaksanakan SAP Berbasis AkruaI, (PP No. 71 Tahun 2010). (Fadhilah Madjid:2016)

Mengutip dari majalah *treasury* edisi 1/2014 bahwa sumber daya manusia (SDM) adalah faktor pengelola dana APBN. Bagaimanapun juga, suatu sistem yang bagus tidak akan pernah bisa berjalan maksimal apabila tidak didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

menyampaikan kepada Majalah Indonesia melalui Edisi 1/2014 wawancara tertulisnya bahwa, “Kompetensi sumber daya manusia memang menjadi kunci keberhasilan. Praktik terbaik internasional juga memberikan penekanan akan pentingnya penyiapan sumber daya manusia dalam rangka penerapan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual. Oleh sebab itu Ditjen Perbendaharaan sudah merencanakan pelatihan yang komprehensif untuk jajaran Ditjen Perbendaharaan dan K/L.”

Proses penyiapan SDM menjadi isu yang sangat penting, mengingat yang terlibat nantinya adalah SDM dari seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Saat ini terdapat kurang lebih 24.000 satuan kerja pengelola dana APBN. Dengan jumlah satker yang begitu besar, tentu saja bisa ditebak bahwa kualitas SDM-nya juga sangat variatif. Sebuah pekerjaan besar untuk menutup atau mengurangi *competency gap* SDM. Setidaknya, SDM yang terlibat dalam operasionalisasi akuntansi berbasis akrual memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi dan dasar-dasar akuntansi.

Dalam teori implementasi kebijakannya mengemukakan bahwa staf yang kompeten dapat diciptakan melalui komunikasi yang baik. Komunikasi dalam implementasi akuntansi berbasis akrual diwujudkan dalam bentuk pelatihan akuntansi dalam bentuk PPAKP, sosialisasi PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan, dan bimbingan teknis penyusunan LKKL berbasis akrual.

Strategi pelatihan SDM dilakukan dengan membagi pelatihan dalam 2 (dua) level, yaitu level manajerial dan level teknis. Pada level manajerial, pelatihan diadakan sebagai kelanjutan kegiatan deklarasi implementasi basis akrual dan didisain dalam bentuk rapat koordinasi tingkat Eselon II dan III pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan, pada level teknis, pelatihan dilakukan untuk mencetak master trainer dan SDM satker (*end user*) yang kompeten dalam menyusun, memahami dan menganalisis laporan keuangan berbasis akrual dengan menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Dalam proses penguatan SDM sebagai salah satu faktor utama yang dapat mendukung keberhasilan implementasi akuntansi berbasis akrual, Ditjen Perbendaharaan akan bahu-membahu bersama Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Selain itu, sinergi yang kuat juga akan dilakukan dengan kementerian/lembaga, perguruan tinggi dan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Penyiapan sumber daya manusia melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Sosialisasi, yaitu:
  1. Sosialisasi Laporan Keuangan Berbasis Akrual pada Rapat Kerja Pejabat Pengelola Keuangan Sekretariat Jenderal.
  2. Sosialisasi Laporan Keuangan Berbasis Akrual pada Rapat Koordinasi Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian LHK.
- b. Bimbingan Teknis, yaitu Bimbingan Teknis Penyusunan laporan keuangan pada Kementerian LHK.
- c. Pelatihan, yaitu:

1. *Training of Trainers* (TOT) tentang pelatihan penyusunan laporan keuangan Kementerian LHK Berbasis Akrual pada Kantor Pusat.
2. Pelatihan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual pada Kementerian LHK Kantor Pusat.

Penggunaan basis akrual (*accrual basis*), mengembangkan prinsip dan asumsi bahwa pencatatan transaksi keuangan tidak hanya dilakukan pada saat terjadi penerimaan dan pengeluaran uang. Dengan basis akrual, informasi yang diberikan kepada pemakai tidak hanya terbatas pada transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pengeluaran kas melainkan juga kewajiban yang membutuhkan penyelesaian kas di masa depan dan informasi lain yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Menurut basis akrual pendapatan dicatat ketika pendapatan tersebut diperoleh, meskipun apabila pendapatan tersebut tidak diterima secara kas sampai jauh di masa mendatang. Begitu pula beban, beban dicatat ketika beban tersebut terjadi, meskipun sebenarnya beban tersebut tidak dibayarkan sampai jauh di masa mendatang. (Abdul Halim dan Syam Kusuf:2012)

Proses penyiapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang digunakan ini adalah proses yang berlaku umum secara internasional dengan penyesuaian terhadap kondisi yang ada di Indonesia. Penyesuaian dilakukan antara lain karena pertimbangan kebutuhan yang mendesak dan kemampuan pengguna untuk memahami dan melaksanakan standar yang ditetapkan.

Penyusunan SAP berbasis akrual dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

1. menyusun Pernyataan Standar akuntansi Pemerintah (PSAP) berbasis akrual seluruhnya dari awal
2. menyesuaikan PSAP berbasis kas menuju akrual (sesuai PP Nomor 24 Tahun 2005) menjadi PSAP berbasis akrual dengan referensi Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (IPSAS), dengan mempertimbangkan praktik-praktik yang berlaku, administrasi pemerintahan yang ada dan kemampuan sumber daya manusia.

Atas dua strategi tersebut, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) sepakat menggunakan strategi yang ke-2, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. SAP berbasis kas menuju akrual telah disusun dengan mengacu pada beberapa referensi bertaraf internasional antara lain IPSAS, Governmental Accounting Standards Board (GASB), dan Government Finance Statistics (GFS), sehingga diharapkan SAP berbasis kas menuju akrual yang akan disesuaikan menjadi akrual sudah dapat diterima umum.
2. Mengurangi resistensi dari para pengguna SAP (PP Nomor 24 Tahun 2005) terhadap perubahan basis akuntansi. Pengguna PP Nomor 24 Tahun 2005 masih dalam tahap pembelajaran dan perlu waktu yang cukup lama untuk memahaminya sehingga apabila SAP akrual berbeda jauh dengan SAP berbasis kas menuju akrual akan menimbulkan resistensi.
3. Penyusunan SAP berbasis akrual relatif menjadi lebih mudah karena sebagian dari PSAP berbasis kas menuju akrual (PSAP Nomor 01, 05, 06, 07, dan 08

dalam PP 24/2005) telah berbasis akrual sehingga hanya memerlukan penyesuaian beberapa PSAP berbasis akrual.

4. Penerapan SAP berbasis akrual yang disusun sesuai pola SAP berbasis kas menuju akrual lebih mudah bagi para pengguna standar karena sudah disosialisasikan, dan para pengguna telah memiliki pemahaman dan pengalaman terhadap SAP berbasis kas menuju akrual. Perkembangan terakhir, telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP berbasis Akrual sebagai pengganti PP 24 tahun 2005.

### **2.2.2 Komitmen Organisasi**

Menurut Indra Kharis (2010) komitmen organisasi adalah suatu keadaan dimana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginan untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Jadi keterlibatan pekerjaan yang tinggi berarti memihak pada pekerjaan tertentu seorang individu. Menurut Moorhead dan Griffin (2015) komitmen organisasi adalah sikap yang mencerminkan sejauh mana seseorang individu mengenali dan terikat pada organisasinya. Seseorang individu yang memiliki komitmen tinggi kemungkinan akan melihat dirinya sebagai anggota sejati organisasi.

Menurut Kreitner dan Kinicki dalam Putu dan I Wayan (2017) komitmen organisasi adalah kesepakatan untuk melakukan sesuatu untuk diri sendiri, individu lain, kelompok atau organisasi.

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi adalah keadaan psikologis individu yang berhubungan dengan keyakinan, kepercayaan dan penerimaan yang kuat terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi, kemauan yang kuat untuk bekerja demi organisasi dan tingkat sampai sejauh mana ia tetap ingin menjadi anggota organisasi.

Menurut Wilson Bangun (2014) menyatakan bahwa ada tiga dimensi komitmen organisasi adalah:

1. Komitmen Afektif Komitmen Afektif adalah perasaan emosional untuk organisasi dan keyakinan dalam nilai-nilainya. Sebagai contoh, seorang karyawan mungkin memiliki komitmen aktif untuk perusahaannya Karena keterlibatannya dengan hewan-hewan.
2. Komitmen Berkelanjutan Komitmen Berkelanjutan adalah nilai ekonomis yang dirasa dari bertahan dalam suatu organisasi bila dibandingkan dengan meninggalkan organisasi tersebut. Sebagai contoh, seorang karyawan mungkin berkomitmen kepada seorang pemberi kerja karena ia dibayar tinggi dan mereka bahwa pengunduran diri dari perusahaan akan menghancurkan keluarga.
3. Komitmen Normatif Komitmen Normatif adalah kewajiban untuk bertahan dalam organisasi untuk alasan-alasan moral dan etis. Sebagai contoh seorang karyawan yang mempelopori sebuah inisiatif baru mungkin bertahan dengan seorang pemberi kerja karena ia merasa meninggalkan seseorang dalam keadaan yang sulit bila ia pergi.

Menurut Malayu S.P Hasibuan (2014) terbentuknya komitmen suatu organisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Faktor Kesadaran
2. Faktor Aturan
3. Faktor Organisasi
4. Faktor Pendapatan
5. Faktor Kemampuan Keterampilan

Berdasarkan kajian teoritis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi mempengaruhi hasil penyusunan laporan keuangan.

### **2.2.3 Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan**

Laporan keuangan merupakan sebuah alat penting bagi para pelaku dunia bisnis. Laporan keuangan memuat catatan-catatan tentang kegiatan bisnis yang dilakukan oleh sebuah entitas dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan juga mempunyai peranan penting sebagai alat komunikasi yang memiliki informasi penting bagi para pembuat keputusan ekonomi, laporan keuangan memiliki empat karakteristik kualitatif (IAI, 2012). Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan serta perubahan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Ketepatwaktuan (*timelines*) adalah informasi yang ada siap untuk digunakan sebelum kehilangan makna oleh pemakai laporan keuangan serta kepastiannya masih tersedia dalam pengambilan keputusan. Ketepatan waktu tidak menjamin relevansi, tetapi relevansi informasi tidak dimungkinkan tanpa ketepatan waktu. Informasi mengenai kondisi dan posisi instansi harus secara cepat dan tepat waktu sampai ke pemakai laporan keuangan (IAI, 2012).

Sesuai dengan peraturan yang diterbitkan Bapepam, X.K.6 tertanggal 7 Desember 2006, maka penyampaian laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dikatakan tepat waktu apabila diserahkan sebelum atau paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan publik tersebut. Sedangkan untuk tengah tahunan:

1. selambat-lambatnya 30 hari setelah tengah tahun berakhir, jika tidak disertai laporan akuntan.
2. selambat-lambatnya 60 hari setelah tengah tahun berakhir jika disertai laporan angkuntan dalam rangka pemetaan terbatas.
3. selambat-lambatnya 90 hari setelah tengah tahun buku berakhir jika disertai laporan akuntan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan maka penyampaian laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dikatakan tepat waktu apabila diserahkan sebelum atau paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan publik tersebut.

#### **2.2.4 Pengertian Sistem Akuntansi**

Sistem merupakan serangkaian bagian yang saling tergantung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu sistem pasti tersusun dari sub-sub sistem yang lebih kecil yang juga tergantung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Dalam pengertian lain Sistem adalah suatu entity yang terdiri dari dua atau lebih komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan. Sistem yang relevan dengan tugas akuntansi adalah *Computer Based System*, yang dapat diartikan terintegrasinya peralatan, program, data dan prosedur untuk menjalankan satu tugas pada suatu komputer.

Terdapat dua kelompok pendekatan dalam mendefinisikan sistem, yaitu kelompok yang menekankan pada prosedurnya dan yang mendefinisikan sistem, yaitu yang menekankan pada prosedurnya dan yang menekankan pada komponen atau elemennya. Pendekatan yang lebih menekankan pada prosedur mendefinisikan, suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Suatu prosedur adalah suatu urutan-urutan operasi klerikal (fulls menulis) biasanya melibatkan beberapa orang didalam satu atau lebih departemen, yang diterapkan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi.

Sistem akuntansi adalah organisasi formulir catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen dalam pengelolaan. Sistem akuntansi merupakan suatu alat yang dipakai untuk mengorganisir atau menyusun, mengumpulkan dan mengikhtiarkan keterangan-keterangan yang menyangkut seluruh transaksi perusahaan, dimana para pegawai, kegiatan-kegiatan perusahaan, bahan-bahan dan mesin-mesin dapat dipadukan sedemikian rupa sehingga pengawasan dapat dijalankan sebaikbaiknya (Mulyadi:2013:3).

Suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan serta seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. (Mulyadi:2013:5)

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi adalah suatu organisasi yang digunakan untuk merangkum semua kegiatan dan transaksi perusahaan guna menghasilkan informasi yang di perlukan oleh manajemen sebagai alat pengawasan demi kelancaran aktivitas perusahaan dimasa yang akan datang. Jadi sistem akuntansi ini dapat dikatakan merupakan metode atau prosedur untuk mencatat dan melaporkan informasi keuangan perusahaan atau organisasi.

#### **2.2.5 Basis Akuntansi Pemerintah**

Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan.

Basis akuntansi pada umumnya ada dua yaitu basis kas dan basis akrual. Namun terdapat modifikasi dari keduanya, yaitu basis kas dan basis akrual sama-sama digunakan dalam menyajikan laporan keuangan (wikiapbn)

### **1. Basis Akuntansi Kas**

Basis akuntansi kas murni dimana pendapatan hanya diakui pada saat kas diterima dan beban hanya diakui pada saat kas dibayarkan. Pada praktek akuntansi pemerintahan di Indonesia, basis kas digunakan untuk menyajikan Laporan Realisasi Anggaran yang berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh Rekening Kas Umum Negara/Daerah, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Akuntansi berbasis kas ini tentu memiliki kelebihan dan keterbatasan. Kelebihan-kelebihan akuntansi berbasis kas adalah laporan keuangan berbasis kas memperlihatkan sumber dana, alokasi, dan penggunaan sumber-sumber kas, mudah untuk dimengerti dan dijelaskan, pembuat laporan keuangan tidak membutuhkan pengetahuan yang mendetail tentang akuntansi dan tidak memerlukan pertimbangan ketika menentukan jumlah arus kas dalam suatu periode. Sementara itu keterbatasan akuntansi berbasis kas adalah hanya memfokuskan pada arus kas dalam periode pelaporan berjalan dan mengabaikan arus sumber daya lain yang mungkin berpengaruh pada kemampuan pemerintah untuk menyediakan barang-barang dan jasa-jasa saat sekarang dan saat mendatang, laporan posisi keuangan (neraca) tidak dapat disajikan karena tidak terdapat pencatatan secara double entry, tidak dapat menyediakan informasi mengenai biaya pelayanan (*cost of service*) sebagai alat untuk penetapan harga (*pricing*), kebijakan kontrak publik, untuk kontrol dan evaluasi kinerja

### **2. Basis Akuntansi Akrual (*Accrual Basis of Accounting*)**

Basis akuntansi akrual (*accrual basis of accounting*) dimana pendapatan diakui pada saat dihasilkan dan beban diakui pada periode terjadinya, tanpa memperhatikan waktu penerimaan atau pembayaran kas. Pada praktek akuntansi pemerintahan di Indonesia, basis akrual digunakan untuk menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Aset diakui saat telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Sedangkan kewajiban diakui saat dana pinjaman diterima dan atau pada saat kewajiban timbul.

Basis akrual menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat termasuk transaksi internal dan arus ekonomi lainnya. Secara sederhana, dikatakan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual ditujukan untuk mengatasi ketidakcukupan basis kas untuk memberikan data yang lebih akurat. Tujuan penerapan basis akuntansi akrual pada dasarnya untuk memperoleh informasi yang tepat atas jasa yang diberikan pemerintah dengan lebih transparan. Tujuan penerapan basis akrual lainnya adalah untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pemerintah. Negara yang menerapkan basis akuntansi akrual, yang mensyaratkan pada manajernya bertanggungjawab atas seluruh biaya yang

diproduksi, bukan hanya nilai kas yang dibayarkan. Hanya dengan basis akrual, biaya yang sebenarnya dapat diinformasikan dan hal ini akan mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan efisien.

Alasan-alasan penggunaan basis akrual diantaranya, akuntansi berbasis kas tidak menghasilkan informasi yang cukup untuk pengambilan keputusan ekonomi misalnya informasi tentang hutang dan piutang, sehingga penggunaan basis akrual sangat disarankan. Hanya akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi yang tepat untuk menggambarkan biaya operasi yang sebenarnya. Hanya akuntansi berbasis akrual yang dapat menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dalam informasi aset dan kewajiban.

### 3. Modifikasi Akuntansi Berbasis Kas

Basis akuntansi ini pada dasarnya sama dengan akuntansi berbasis kas, namun dalam basis ini pembukuan untuk periode tahun berjalan masih ditambah dengan waktu atau periode tertentu (*specific period*) misalnya 1 atau 2 bulan setelah periode berjalan. Penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi selama periode tertentu tetapi diakibatkan oleh periode pelaporan sebelumnya akan diakui sebagai penerimaan dan pengeluaran atas periode pelaporan yang lalu (periode sebelumnya). Arus kas pada awal periode pelaporan yang diperhitungkan dalam periode pelaporan tahun lalu dikurangkan dari periode pelaporan berjalan (Sukriy:2013)

Laporan keuangan dalam basis ini juga memerlukan pengungkapan tambahan atas item-item tertentu yang biasanya diakui dalam basis akuntansi akrual. Pengungkapan tersebut sangat beragam sesuai dengan kebijakan pemerintah. Sebagai tambahan atas item-item yang diungkapkan dalam basis kas, ada beberapa pengungkapan yang terpisah atas saldo near-cash yang diperlihatkan dengan piutang-piutang yang akan diterima dan utang-utang yang akan dibayar selama periode tertentu dan aset finansial and kewajiban. Sebagai contoh Pemerintah Malaysia menggunakan *specified period* dalam laporan keuangan tahunan, yang mengungkapkan beberapa catatan (*memo*) mengenai: aktiva, investasi, kewajiban, utang pemerintah (*public debt*), jaminan (*guarantees*), dan nota pembayaran. Dalam basis ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a) Fokus pengukuran di bawah basis ini adalah pada sumber keuangan sekarang (*current financial resources*) dan perubahan-perubahan atas sumber-sumber keuangan tersebut. Basis akuntansi ini mempunyai fokus pengukuran yang lebih luas dari basis kas, pengakuan penerimaan dan pembayaran kas tertentu selama periode spesifik berarti bahwa terdapat informasi mengenai piutang dan hutang, meskipun tidak diakui sebagai aktiva dan kewajiban.
- b) Kriteria pengakuan atas penerimaan selama periode tertentu adalah bahwa penerimaan harus berasal dari periode yang lalu, namun penerapan ini tidak seragam untuk semua negara. Beberapa pemerintah menganggap bahwa seluruh penerimaan yang diterima selama periode tertentu adalah berasal dari periode sebelumnya, sedangkan pemerintah yang lain mengakui hanya beberapa dari penerimaan tersebut.



- c) Penetapan panjangnya periode tertentu bervariasi antara beberapa pemerintah, namun ada beberapa ketentuan, yaitu:
1. Periode tertentu diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun
  2. Periode tertentu harus sama untuk penerimaan dan pembayaran kas
  3. Kriteria yang sama atas pengakuan penerimaan dan pembayaran kas selama periode tertentu harus diterapkan untuk seluruh penerimaan dan pembayaran
  4. Satu bulan adalah waktu yang tepat, karena pembelian barang secara kredit umumnya diselesaikan dalam periode tersebut, periode tertentu yang terlalu lama mungkin mengakibatkan kesulitan dalam menghasilkan laporan keuangan
  5. Kebijakan akuntansi yang dipakai harus diungkapkan secara penuh (*fully disclosed*).

#### 4. Modifikasi Akuntansi Berbasis Akrua

Basis akuntansi ini meliputi pengakuan beberapa aktiva, namun tidak seluruhnya, seperti aktiva fisik, dan pengakuan beberapa kewajiban, namun tidak seluruhnya, seperti utang pensiun. Contoh bervariasinya (modifikasi) dari akuntansi akrual, dapat ditemukan dalam paktek sebagai berikut ini:

- a) Pengakuan seluruh aktiva, kecuali aktiva infrastruktur, aktiva pertahanan dan aktiva bersejarah/warisan, yang diakui sebagai beban (*expense*) pada waktu pengakuisisian atau pembangunan. Perlakuan ini diadopsi karena praktek yang sulit dan biaya yang besar untuk mengidentifikasi atau menilai aktiva-aktiva tersebut
- b) Pengakuan hampir seluruh aktiva dan kewajiban menurut basis akrual, namun pengakuan pendapatan berdasar pada basis kas atau modifikasi dari basis kas
- c) Pengakuan hanya untuk aktiva dan kewajiban finansial jangka pendek
- d) Pengakuan seluruh kewajiban dengan pengecualian kewajiban tertentu seperti utang pensiun.

Beberapa penyusun standar telah mengidentifikasi kriteria atas waktu pengakuan pendapatan dengan akuntansi berbasis akrual, sebagai contoh Pemerintah Kanada mengakui pendapatan dalam periode di mana transaksi atau peristiwa telah terjadi ketika pendapatan tersebut dapat diukur (*measurable*). Pemerintah Federal Amerika Serikat mengakui pendapatan pajak dalam periode akuntansi di mana pendapatan tersebut menjadi *susceptible to accrual* (yaitu ketika pendapatan menjadi measurable dan available untuk mendanai pengeluaran). *Available* berarti dapat ditagih dalam periode sekarang atau segera setelah terjadi transaksi.

#### 2.2.6 Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA)

Laporan keuangan digunakan oleh berbagai macam pihak termasuk pemerintah. Ada beberapa perbedaan mendasar tentang tujuan laporan keuangan. Sektor privat (korporasi) menggunakan laporan keuangan sebagai alat pengukur kinerja manajemen dalam menjalankan usahanya. Sektor pemerintah (publik) menggunakan laporan keuangan sebagai bahan pertanggung jawaban mengenai

anggaran yang telah dikeluarkan untuk kebutuhan dan tujuan instansi. Jika tujuan korporasi adalah mencari laba, maka sektor pemerintah bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan dana yang telah dikeluarkan oleh pemerintah bisa digunakan dan dikelola dengan baik oleh instansi untuk menambah kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Laporan keuangan sektor pemerintah juga harus disusun menggunakan standar/dasar tertentu. Standar/dasar dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal Pada Pemerintah Pusat. (Arieffin Dian Permana:2016)

Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 dan Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 dan sebagai wujud adanya reformasi di bidang keuangan telah mengamanatkan bahwa sistem akuntansi dan penyusunan pelaporan keuangan pemerintah harus berdasarkan basis akrual. Pelaksanaan sistem akuntansi berbasis akrual ini harus sudah dilaksanakan selambat-lambatnya 5 tahun sejak Undang-Undang tentang Keuangan Negara pertama kali disahkan atau lebih tepatnya tahun 2008, sistem akuntansi pemerintah sudah berbasis akrual.

Sebagai perdoman dalam pengimplementasian sistem tersebut telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Selama 5 tahun tersebut, sistem akuntansi akrual belum dapat diimplementasikan dan sebagai masa transisi sistem yang digunakan adalah sistem kas menuju akrual (*Cash Basis toward Accrual*). Pada kenyataannya setelah tahun 2008 masih banyak yang harus dilakukan persiapan-persiapan dan penyempurnaan-penyempurnaan sehingga terjadi penundaan implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

SAIBA merupakan aplikasi akuntansi pemerintah pusat yang dibuat dalam rangka menghasilkan laporan keuangan berbasis akrual. Penerapan aplikasi di sektor pemerintahan tidak kalah pentingnya bila dibandingkan dengan sektor swasta. Instansi diharapkan bekerja dan menghasilkan kualitas pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Selain itu instansi juga harus bertanggungjawab atas anggaran yang diberikan, dimana anggaran tersebut sudah seharusnya terserap untuk kegiatan operasionalnya meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah laporan keuangan yang menunjukkan berapa besarnya penyerapan anggaran yang digunakan beserta penjelasannya. Kementerian Keuangan telah mengembangkan aplikasi yang selama ini telah digunakan dalam basis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) yaitu Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) menjadi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akruwal (SAIBA) untuk digunakan setiap Kementerian/Lembaga. Pengembangan sistem adalah proses modifikasi atau penggantian sebagian atau keseluruhan sistem informasi.

Aplikasi SAIBA sebagai sistem akuntansi keuangan (*software*) yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Tentu saja menjadi salah satu faktor kunci implementasi akuntansi berbasis akrual. Pengoperasian aplikasi SAIBA akan menjadi maksimal bila para operator memiliki pemahaman tentang akuntansi

dasar secara memadai. Pada saat pemahaman di bidang akuntansi dasar telah memadai, para operator aplikasi akan lebih mudah memahami dan mengoperasikan aplikasi SAIBA. Namun jika para operator mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi SAIBA, maka akan memberikan dampak yang tidak baik dalam implementasi akuntansi berbasis akrual.

Untuk persiapan penyelenggaraan training, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan workshop Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA), Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP). Untuk pelaksanaan workshop di daerah, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan juga bekerja sama dengan Balai Diklat Keuangan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).

Terkait dengan penyiapan teknologi informasi, telah dihasilkan sistem aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2013, dan sistem aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Sampai dengan tahun 2014 sistem aplikasi SAKTI masih terdapat penyempurnaan-penyempurnaan sehingga tidak dimungkinkan dapat digunakan untuk tahun 2015, sedangkan pada tahun 2015 seluruh satker sudah diwajibkan melaksanakan sistem akuntansi dan penyusunan laporan keuangan yang berbasis akrual penuh.

Sebagai gantinya, pemerintah yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah mengembangkan aplikasi akuntansi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA). Sistem ini merupakan modifikasi dari aplikasi SAKPA yang selama ini telah familiar digunakan oleh seluruh satker yang ada sehingga para satker tidak akan mengalami kesulitan untuk mempelajari aplikasi SAIBA.

Modifikasi tersebut meliputi migrasi saldo awal, pencatatan transaksi, dan penyesuaian-penyesuaian. Dalam menganalisis transaksi-transaksi yang semula dicatat berdasarkan basis kas pada saat terjadinya transaksi tersebut akan disesuaikan pada akhir periode ke dalam sistem basis akrual, sangat diperlukan seorang operator aplikasi yang memiliki pemahaman dan kemampuan di bidang akuntansi dasar.

Sedangkan kondisi yang ada pada beberapa satker masih banyak para operator aplikasi SAKPA yang memiliki pemahaman di bidang akuntansi dasar yang sangat minim bahkan ada yang tidak memiliki pemahaman akuntansi dasar sama sekali dan tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi.

Secanggih apapun sistem pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kekurangan dari aplikasi SAIBA ini adalah:

1. Aplikasi SAIBA masih dalam tahap pengembangan, sehingga sering membutuhkan update instal aplikasi untuk memperbarui fitur yang ada sebelumnya. Sebelum aplikasi yang terbaru bisa diupdate proses input data perlu dilakukan secara manual karena dari update aplikasinya ada beberapa kode akun yang berubah. Terkadang instruksi untuk mengupdate aplikasi sudah terbit, akan

tetapi file update aplikasi belum keluar, sehingga user Aplikasi SAIBA masih dalam tahap pengembangan, sehingga sering membutuhkan update instal aplikasi untuk memperbarui fitur yang ada sebelumnya. Sebelum aplikasi yang terbaru bisa diupdate proses input data perlu dilakukan secara manual karena dari update aplikasinya ada beberapa kode akun yang berubah. Terkadang instruksi untuk mengupdate aplikasi sudah terbit, akan tetapi file update aplikasi belum keluar, sehingga user harus menunggu sampai aplikasi tersebut bisa diupdate. Jika update aplikasi terlambat proses rekonsiliasi juga ikut terlambat. Proses rekonsiliasi juga dilakukan setiap satu bulan sekali dengan kantor pusat. Hal ini dilakukan untuk menyamakan data dari kantor pusat dengan data yang ada. Proses rekonsiliasi dilakukan karena terdapat transaksi, seperti revisi anggaran yang menyebabkan perbedaan jumlah antara anggaran sebelum dan sesudah revisi yang ada di kantor pusat. Proses terjadinya pembayaran gaji juga perlu disesuaikan karena pengakuan utang gaji pada akhir bulan dan pembayaran gaji baru dilakukan diawal bulan. Penelitian oleh Gheorghe, Nicolae, Dorel, (2012) menyatakan bahwa merupakan hal yang wajar jika sebuah sistem akan berevolusi mengikuti perkembangan jaman dan kebutuhan untuk menemukan bentuk terbaiknya. Hal itu sangat berguna untuk menyesuaikan fungsi sistem itu sendiri dengan keadaan yang ada karena segala sesuatu pasti akan berubah dan sistem diciptakan untuk memenuhi kebutuhan users. Jika suatu sistem tidak dapat menyediakan kebutuhan users berarti sistem tersebut membutuhkan perbaikan atau tidak perlu digunakan lagi.

2. Tampilan yang kurang user-friendly jika dibandingkan dengan aplikasi sebelumnya. Sebuah aplikasi baru pastinya akan sangat asing pada pertama kalinya, oleh karena itu jika users kesulitan untuk mencari sesuatu maka menu search engine akan dijadikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Menu search engine pada aplikasi SAIBA ini dirasa sangat kurang. Jika operator mencari kode atau klasifikasi akun dalam menu search engine, maka menu pencari tersebut tidak mampu mengakomodasi kebutuhan tersebut. Operator harus terlebih dahulu menemukan kode dan kata kunci yang tepat untuk menemukan klasifikasi dan akun yang tepat. Cara lain yang bisa dilakukan adalah melihat dan mencari di daftar kode akun yang jumlahnya sangat banyak. Hal ini sangatlah menyulitkan dan membutuhkan banyak waktu. Frederik, Guido, (2014) menyatakan, sebuah sistem informasi akuntansi harus bisa menangkap dan menggambarkan proses bisnis perusahaan, dimana sebuah sistem idealnya dibuat secara detail dan efektif agar bisa dipahami sepenuhnya oleh users. Detail identik dengan rumit, akan tetapi jika sistem tersebut bisa memberikan bantuan kepada users untuk mengatasi jika terjadi kesulitan maka sistem tersebut dinilai efisien. Aplikasi ini juga tidak mempunyai shortcut atau menu favourite untuk transaksi/kegiatan yang sering dilakukan.
3. Proses import data dari aplikasi lain seperti aplikasi SIMAK dan SPM terkadang membutuhkan waktu yang sangat lama. Seperti yang telah dijelaskan

sebelumnya, bahwa aplikasi SAIBA ini melibatkan aplikasi lain dalam kegiatan proses datanya, sehingga terjadi proses transfer data antara aplikasi satu dengan aplikasi yang lain. Walaupun terdapat pada tempat/komputer yang sama, proses transfer data bisa membutuhkan waktu lama karena tingkat kestabilan antara aplikasi yang satu dengan yang lainnya. Aplikasi SIMAK dan SPM pun terkadang membutuhkan update aplikasi seperti aplikasi SAIBA. Update aplikasi dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas dan memenuhi kebutuhan pengguna aplikasi serta update aplikasi ini menambahkan fitur yang belum ada pada versi aplikasi sebelumnya. Penelitian Fernando, Antonio, (2014) menunjukkan bahwa kebutuhan pelaporan informasi baik yang bersifat finansial dan non finansial secara real-time semakin meningkat. Persaingan antara perusahaan yang satu dengan yang lain menyebabkan kebutuhan mengenai informasi terbaru sangatlah dibutuhkan untuk melihat adanya kesempatan bisnis maupun mengatasi permasalahan yang ada. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah sistem informasi yang uptodate untuk bisa memfasilitasi kebutuhan tersebut.

Selain adanya kekurangan dari aplikasi tersebut, aplikasi SAIBA juga mempunyai kelebihan yaitu:

1. Tingkat keamanan data yang tinggi. Aplikasi ini dibuat dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Divisi Sistem Perbendaharaan dan Divisi Akuntansi dan Pelaporan. Jika terdapat masalah, maka permasalahan tersebut bisa segera diatasi dengan lebih cepat. Tingkat keamanan data juga relatif lebih aman karena aplikasi ini bukan buatan pihak lain. Kebutuhan instansi lebih bisa terpenuhi karena aplikasi ini mengadopsi proses bisnis kegiatan instansi sehingga fitur aplikasi ini disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Desain dari aplikasi ini mensyaratkan bahwa hanya orang yang mempunyai otorisasi khusus yang bisa menjalankan aplikasi ini. Salah satu isu terkait dengan sistem informasi adalah tingkat keamanan sistem informasi tersebut. Sistem yang terkomputerisasi menyebabkan akses terhadap suatu informasi menjadi sangat mudah. Hal itu sangatlah rawan mengingat data perusahaan merupakan data yang sangat rahasia. Sehingga akses untuk data tersebut perlu dibatasi (Maziyar, Vahid, Mohammad, Elham, 2011).
2. Meminimalisasi human error dan efisiensi sumber daya manusia. Aplikasi SAIBA ini merupakan pembaharuan dari aplikasi sebelumnya. Perubahan ini dilakukan karena adanya perubahan basis akuntansi instansi pemerintah yang semula cash basis menjadi accrual basis. Kondisi ini akan merubah segala proses kegiatan pemerintahan. Transaksi yang terjadi dan diakui tidak hanya menjadi semakin kompleks, akan tetapi nilai transaksi juga akan semakin tinggi. Hal ini akan menjadi resiko apabila sistem manual digunakan untuk memproses kegiatan pemerintahan karena bisa terjadi kesalahan ketik, kesalahan klasifikasi, ataupun pemahaman yang kurang mendalam tentang proses bisnis pemerintahan. Manusia adalah makhluk yang rentan terhadap tekanan, sehingga dibutuhkan sebuah alat/sistem untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat tekanan

tersebut (Maria, Otilia 2014). Dengan adanya aplikasi ini, kesalahan tersebut bisa diminimalisir. Pengguna aplikasi ini bisa menggunakan data dari aplikasi lain dalam pemrosesan informasi dan tetap bisa melakukan input manual untuk transaksi tertentu sehingga menghasilkan tingkat keandalan dan akurasi informasi yang tinggi. Operator tidak perlu menginput data transaksi yang sedemikian banyak dan bisa menimbulkan resiko kesalahan. Dibutuhkan hanya 1 orang/operator saja dalam menjalankan aplikasi ini. Operator disini harus mendapatkan pelatihan khusus sebelum menjalankan aplikasi. Hal ini menyebabkan kebutuhan personil di dalam instansi bisa dialokasikan ke bagian tertentu. Suatu entitas harus menerapkan model proses bisnis yang tepat, dimulai dari penetapan tujuan perusahaan, proses kegiatan, hingga alokasi sumber daya yang dibutuhkan. Alokasi sumber daya yang tepat akan membuat organisasi bergerak menuju tujuan yang telah ditetapkan (Frederik, Guido, 2014).

Proses pengolahan dan pelaporan yang cepat. Aplikasi ini membuat proses perekaman dan pelaporan yang dahulu membutuhkan waktu yang cukup lama menjadi semakin cepat dan mudah. Hal ini membuat informasi yang dihasilkan menjadi berguna untuk dijadikan sebagai pertimbangan keputusan karena ada disaat dibutuhkan. Bisa dibayangkan jika aplikasi ini memproses data secara lambat, maka keputusan seperti perlu atau tidaknya revisi anggaran untuk memenuhi kebutuhan bisa terganggu. Laporan keuangan juga tidak bisa didasarkan sebagai sarana pertanggungjawaban jika informasi yang dihasilkannya terlambat. Menurut Marika, Antonio, Marco (2015) dalam bisnis keterlambatan pengambilan keputusan akan dapat menghilangkan peluang emas yang seharusnya di raih. Tidak terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa keputusan yang cepat meski sedikit kurang tepat akan jauh lebih baik dibandingkan dengan keputusan tepat namun terlambat. Faktor kecepatan dalam mendapatkan informasi ini sering menyebabkan menjadi mahalnya informasi. Masalah kecepatan proses pengolahan data sampai menjadi informasi dalam sebuah sistem informasi ini akan terjawab jika sistem informasi didukung oleh teknologi informasi.

Tabel 2.1

## Strategi Penerapan SAP Berbasis AkruaI secara Bertahap

Tahun	Kegiatan
2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerbitan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI</li> <li>b. Mengembangkan <i>Framework</i> Akuntansi Berbasis AkruaI</li> <li>c. Sosialisasi SAP Berbasis AkruaI</li> </ul>
2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyiapan aturan pelaksanaan dan kebijakan akuntansi</li> <li>b. Pengembangan Sistem Akuntansi dan TI bagian pertama (proses bisnis dan <i>detail requirement</i>)</li> <li>c. Pengembangan kapasitas SDM</li> </ul>

2012	a. Pengembangan Sistem Akuntansi dan TI (lanjutan) b. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2013	a. <i>Piloting</i> beberapa KL dan BUN b. Review, Evaluasi dan Konsolidasi seluruh LK c. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2014	a. <i>Pararel Run</i> dan Konsolidasi seluruh b. Review, Evaluasi dan Konsolidasi seluruh LK c. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2015	a. Implementasi penuh b. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2015	a. LKPP CTA, dilengkapi Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual b. <i>Rollout</i> SPAN dan <i>Piloting</i> SAKTI c. Penyiapan kebijakan dan peraturan akuntansi berbasis akrual d. Sosialisasi dan training reformasi akuntansi akrual untuk BPK, DPR, DPD, BAKN dan <i>end user</i> e. Monitoring dan evaluasi persiapan implementasi akuntansi berbasis akrual

Sumber: KSAP, Sosialisasi PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP. Jakarta, 14 Desember 2010.

### 2.2.7 Tujuan dan Manfaat Basis Akrual

Secara sederhana, dikatakan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual ditujukan untuk mengatasi ketidakcukupan basis kas untuk memberikan data yang lebih akurat dan dapat digunakan oleh para pengguna informasi. *Heather Thompson, Project Manager dari Transition from Cash to Accrual Accounting Project, Public Expenditure Management*, pemerintah BARBADOS, menyampaikan beberapa tujuan penggunaan basis akrual yakni sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem keuangan (penganggaran, akuntansi dan pelaporan) dalam sektor publik.
2. Untuk meningkatkan pengendalian fiskal, manajemen aset dan budaya sektor public.
3. Untuk meningkatkan akuntabilitas dalam program penyediaan barang dan jasa oleh pemerintah.
4. Menyediakan informasi yang lebih lengkap bagi pemerintah untuk pengambilan keputusan.
5. Untuk mereformasi sistem anggaran belanja (apropriasi).
6. Untuk mencapai transparansi yang lebih luas atas biaya pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah.

Dengan demikian, tujuan penerapan basis akuntansi akrual pada dasarnya untuk memperoleh informasi yang tepat atas jasa yang diberikan pemerintah dengan lebih transparan.

Manfaat-manfaat penerapan basis akrual, menurut H Thompson, akan mencakup hal-hal dibawah ini:

1. Menyediakan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah.
2. Menunjukkan bagaimana aktivitas pemerintah dibiayai dan bagaimana pemerintah dapat memenuhi kebutuhan kasnya.
3. Menyediakan informasi yang berguna tentang tingkat yang sebenarnya kewajiban pemerintah.
4. Meningkatkan daya pengelolaan aset dan kewajiban pemerintah.
5. Basis akrual sangat familiar pada lebih banyak orang dan lebih komprehensif dalam penyajian informasinya.
6. Prinsip dan standar yang dapat diterima umum membentuk basis transaksi pelaporan.
7. Menyediakan data yang lebih meningkat ketika pemerintah melakukan kegiatan perencanaan dan pengambilan keputusan ekonomi.
8. Secara signifikan memperkuat pengelolaan dan pengembangan anggaran, khususnya melalui pengakuan dan pengendalian aset dan kewajiban pemerintah.
9. Statistik Keuangan Pemerintah (GFS) yang dipraktekkan secara internasional berbasis akrual.

### **2.3 Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang penting bagi para penggunanya, terutama dalam rangka pengambilan keputusan. Pada setiap akhir usaha, setiap perusahaan atau lembaga akan menyusun laporan keuangan yang selanjutnya dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan Keuangan akan menjadi lebih bermanfaat apabila informasi yang terkandung dalam Laporan Keuangan tersebut dapat digunakan untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa mendatang, melalui suatu proses perbandingan, evaluasi, dan analisis trend.

Analisis Laporan Keuangan merupakan suatu proses untuk “membedah” laporan keuangan ke dalam unsur-unsurnya dan menelaah masing-masing dari unsur tersebut dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik atas Laporan Keuangan itu sendiri. Hasil analisis Laporan Keuangan akan membantu analisis dalam menginterpretasikan berbagai hubungan kunci antar pos Laporan Keuangan, serta dapat dijadikan sebagai dasar dalam menilai potensi keberhasilan perusahaan di masa mendatang.

Laporan keuangan biasanya dilengkapi dengan Catatan Atas Laporan Keuangan. Catatan ini merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari komponen laporan keuangan. Tujuan catatan ini adalah untuk memberikan penjelasan yang lebih lengkap mengenai yang disajikan dalam Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat dipergunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut (Wikipedia,2010). Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan definisi Laporan Keuangan sebagai laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.



Laporan Keuangan menjadi alat yang digunakan untuk menunjukkan capaian kinerja dan pelaksanaan fungsi pertanggungjawaban dalam suatu entitas (Choiriyah,2010).

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik berikut ini merupakan prasyarat *normative* yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang di kehendaki.

### 1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengavaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya informasi. Informasi yang relevan adalah:

- a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*) informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi dimasa lalu
- b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*) informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c) Tepat waktu informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d) Lengkap.

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam Laporan Keuangan diungkapkan dengan jelas.

### 2. Andal

Penggunaan informasi tersebut dapat dicegah informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut:

Penyajian jujur informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

- a) Dapat diverifikasi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh beda.

- b) Netralitas informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

### **3. Dapat Dibandingkan**

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

### **4. Dapat dipahami**

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. Alasan dibuatnya laporan keuangan:

1. Internal
  - a) Alat pengendalian
  - b) Evaluasi kinerja manajerial dan organisasi
2. Eksternal
  - a) Bentuk mekanisme pertanggungjawaban.
  - b) Dasar pengambilan keputusan.

Laporan keuangan pokok yang disusun pada SAP lama (PP No. 24/2005) terdiri dari:

#### **1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah dalam satu periode pelaporan. LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. LRA menyajikan unsur-unsur Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/deficit, Pembiayaan, Sisa lebih/kurang pembiayaan.

#### **2) Neraca**

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsurunsur dalam neraca meliputi:

a) Aset

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dimana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

b) Kewajiban

Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diakui pada saat pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

c) Ekuitas

Kekayaan neto pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas.

### 3) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

### 4) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

CALK meliputi penjelasan atau daftar terperinci atau analisis atau nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- a) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target
- b) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- c) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan- kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- d) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- e) Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.
- f) Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan
- g) Daftar dan skedul.

Laporan keuangan pemerintah PP 71/2010 yang berbeda dengan PP 24/2005:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan realisasi anggaran menggunakan basis akuntansi kas dalam penyajiannya. Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum Negara/Daerah. Sedangkan belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum Negara/Daerah. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL).

## 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Saldo anggaran lebih adalah gabungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Saldo anggaran lebih awal, Penggunaan saldo anggaran lebih, Sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berjalan. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya dan saldo anggaran lebih akhir.

## 3. Laporan Operasional (LO)

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan operasional sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos sebagai berikut :

### a) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

### b) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya oleh entitas pelaporan.

### c) Surplus/defisit

Dari operasi Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Sedangkan defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos surplus/defisit dari kegiatan operasional.

### d) Kegiatan non operasional

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

### e) Surplus/defisit sebelum pos luar biasa

### f) Pos luar biasa

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam laporan operasional dan disajikan sesudah surplus/defisit sebelum pos luar biasa. Pos luar biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran.
2. Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang.
3. Kejadian diluar kendali entitas pemerintah

g) Surplus/defisit-LO

Surplus/defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Saldo surplus/defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke laporan perubahan ekuitas.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pospos :

- a. Ekuitas awal
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dana, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar misalnya:
  1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya.
  2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir

## 2.4 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

### 2.4.1 Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.2  
Penelitian Sebelumnya

No.	Nama Penulis	Judul	Variabel	Indikator	Hasil	Publikasi
1.	Iput Dyah Susanti, Muhammad Ahyaruddin, dan Muhammad Hidayat, 2016	Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dalam Penyajian Laporan Keuangan (Studi	independen: Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA)  dependen: Penyajian Laporan	1. Waktu/periode dilakukannya penyesuaian,  2. Penerapannya dimulai dari migrasi saldo awal  1. perekaman pagu anggaran menggunakan dokumen DIPA	Penerapan SAIBA telah mengikuti prosedur yang ada di PMK 270/PMK-05/2014 mulai dari migrasi saldo awal, perekaman dokumen sumber berupa DIPA, dan perekaman dokumen transaksi belanja yang berasal dari SPP,	E-Jurnal

		Kasus Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau)	Keuangan	(Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran), dan 2. menginput transaksi dari dokumen, posting data data yang udah diinput. mengacu pada PMK 270/PMK.05/2014	SPM, dan SP2D.	
2.	Nurulita Irmaya Adelina, 2018	Implementasi Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual pada Rumah Sakit Umum Daerah (Studi Kasus pada RSUD Tugurejo Tahun 2018)	Variable independen: Implementasi pelaporan keuangan berbasis akrual	1. Menentukan besarnya biaya yang dibutuhkan 2. Menentukan harga pelayanan 3. Memahami kesiapan para pengguna SAIBA	Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang berkaitan dengan implementasi akuntansi berbasis akrual pada laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dalam mengatasi kendala yang dihadapi pada saat implementasi akuntansi berbasis akrual pada sektor publik	E-Jurnal Universitas Diponegoro
3.	Teguh Erawati, Danang Kurniawan, 2018	Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual	Variabel independen: Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual	1. Komitmen 2. Organisasi 3. SDM 4. Pemanfaatan teknologi informasi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan system akuntansi akrual dipengaruhi oleh komitmen organisasi. Sedangkan, sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.	ISSN: 1979-6471 E-ISSN: 2528-0147 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
4.	Alfonsus Jantong, Nurkholis,	Faktor-Faktor Yang	Variable independen: -Hubungan	1. Kualitas sumber daya manusia 2. Komitmen	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan	ISSN: 1829-7528 ISSN:

	Roekhudin, 2018	Mempengaruhi Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintahan Daerah	antara kualitas sumber daya manusia  -Hubungan antara komitmen organisasi  Variable dependen: Kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrua	3. Pendampingan 4. Sarana prasarana standar akuntansi pemerintah berbasis akrua 5. Pelatihan akuntansi pemerintahan berbasis akrua 6. Kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrua	dan pendampingan berpengaruh positif terhadap kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana tidak berpengaruh terhadap kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrua. Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kesiapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrua	2581-1584
5.	Riris Setiawati Kusuma, 2013	Analisis Kesiapan Pemerintah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jember)	Variabel independen: Kesiapan Pemerintah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua	1. Komitmen 2. SDM 3. Sarana Prasarana 4. System informasi	Hasil penelitian menunjukkan penelitian kesiapan Pemerintah kota Jember dalam implementasi SAP berbasis akrua penuh berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 telah baik.	E-Jurnal Universitas Jember
6.	Langelo (2015)	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung	Independen: a. SDM b. Perangkat Pendukung Dependen: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua	1. kesiapan perangkat pendukung 2. peningkatan kualitas dan jumlah SDM 3. pengadaan sosialisasi	Hasil penelitian deskriptif ini menunjukkan bahwa pemerintah kota Bitung belum menerapkan PP No.71 Tahun 2010 tetapi telah sesuai dengan PP No.24 Tahun 2005. Terdapat kendala dalam kesiapan berupa jumlah SDM pelaksana belum cukup di setiap SKPD dan kesiapan	ISSN 2303-1174

					perangkat pendukung yang belum teruji.	
--	--	--	--	--	--	--

#### 2.4.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pada penelitian ini memberikan gambaran tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akruwal (SAIBA). Kerangka pemikiran adalah model konseptual yang menggambarkan hubungan diantara berbagai macam faktor yang telah diidentifikasi sebagai sesuatu hal yang penting bagi suatu masalah (Nur Ahmadi Bi Rahmani:2016). Berikut ini mengenai kerangka pemikiran dari penelitian ini:

#### 2.4.3 Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akruwal Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Kementerian LHK

Dimana sesuai dengan kerangka waktu implementasi SAP berbasis akruwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010. Tahun 2014 merupakan tahun terakhir pemerintah menggunakan basis kas menuju akruwal. Dimana pada tahun 2015 Pemerintah Pusat dan Daerah harus sudah menggunakan basis akruwal dalam penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan basis akruwal dimaksudkan untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif dan lebih baik bagi para pemangku kepentingan baik para pengguna laporan keuangan dibandingkan dengan basis kas menuju akruwal yang selama ini dianut.

Dimana pada tingkat Kementerian/Lembaga itu terdiri dari beberapa satuan kerja, dimana satuan kerja ini adalah untuk memasukan data keuangan pada aplikasi SAIBA dan diinput ke e-Rekon. SAIBA dan SIMAK tidak sama maka aplikasinya harus diupdate dan untuk mengambil datanya tidak bisa dari SAIBA offline harus dari e-Rekon.

Siklus akuntansi pemerintahan tidak jauh berbeda dengan siklus akuntansi pada perusahaan. Siklus akuntansi pada pemerintahan dimulai dari pencatatan dokumen anggaran, dokumen saldo awal, dokumen penerimaan, dokumen pengeluaran dan lain-lain, proses posting ke dalam buku besar dan penyusunan laporan keuangan setelah dilakukan penyesuaian yang diperlukan. *Yang membedakan antara lain adalah pada akuntansi pemerintahan tidak ada Laporan Laba Rugi dan Laporan Laba Ditahan.* Laporan yang mirip dengan Laporan Laba Rugi pada pemerintahan disebut dengan Laporan operasional. Pada akuntansi pemerintahan juga disusun Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.

SAIBA merupakan aplikasi akuntansi pemerintah pusat yang menghasilkan laporan keuangan berbasis akruwal. Karena, selama ini telah terbukti mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akuntabel. Diataranya



tercermin dari opini audit BPK yang menunjukkan perkembangan positif dari tahun ke tahun.

Aplikasi SAIBA ini juga telah berhasil mengantarkan sebagian besar Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dan laporan keuangan Pemerintahan Pusat mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian pada tahun 2015. Berdasarkan latar belakang diatas dapat diketahui bahwa implementasi akuntansi berbasis akrual merupakan hal yang baru diterapkan pada pemerintah pusat, yang memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kredibilitas pemerintah pusat, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional.

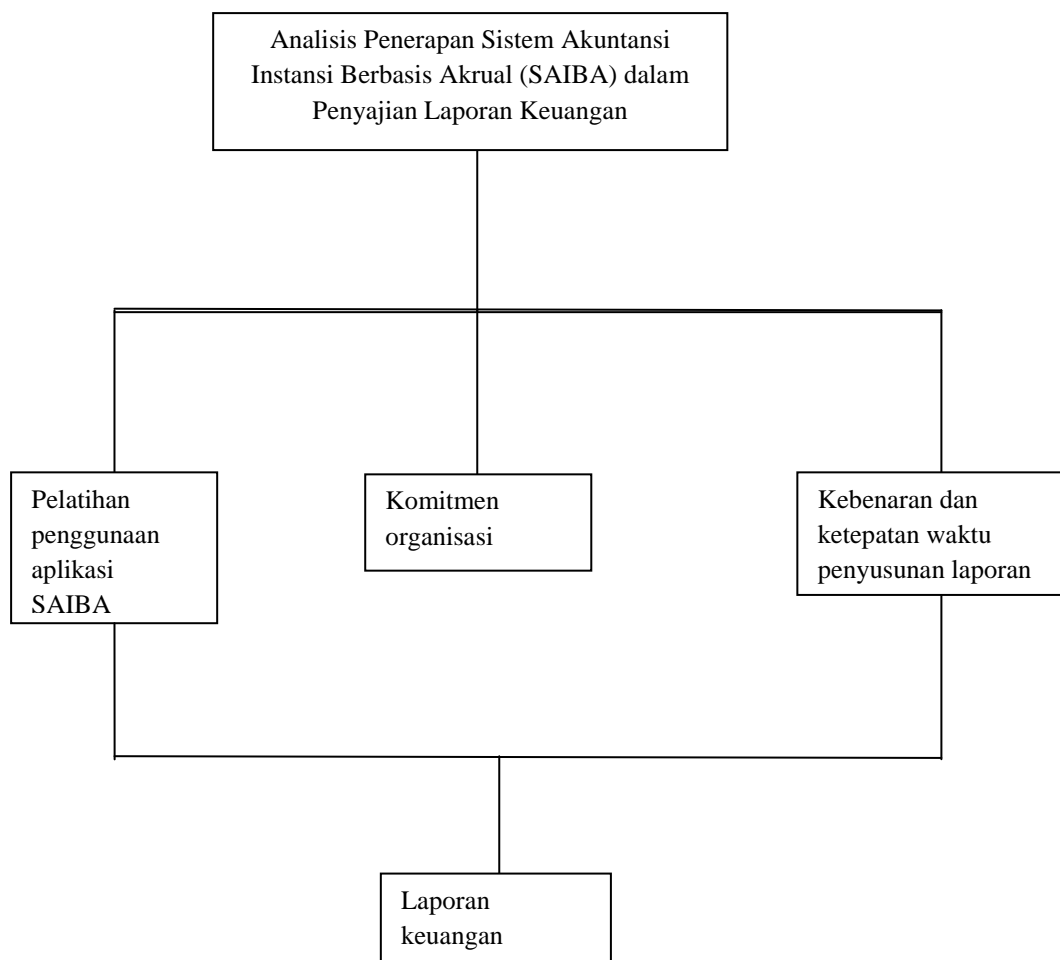
Basis akuntansi akrual (*accrual basis of accounting*) dimana pendapatan diakui pada saat dihasilkan dan beban diakui pada periode terjadinya, tanpa memperhatikan waktu penerimaan atau pembayaran kas. Pada praktek akuntansi pemerintahan di Indonesia, basis akrual digunakan untuk menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Aset diakui saat telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Sedangkan kewajiban diakui saat dana pinjaman diterima dan atau pada saat kewajiban timbul.

Pengoperasian aplikasi SAIBA akan menjadi maksimal bila para operator memiliki pemahaman tentang akuntansi dasar secara memadai. Pada saat pemahaman di bidang akuntansi dasar telah memadai, para operator aplikasi akan lebih mudah memahami Akuntansi Pemerintah Akrual dan mengoperasikan aplikasi SAIBA.

Hubungan antara SAIBA yang digunakan dalam laporan keuangan yang terdapat pada judul diatas menunjukkan bahwa laporan keuangan itu sendiri diinput melalui aplikasi SAIBA, maka laporan keuangan tersebut akan ada jika diinput melalui aplikasi SAIBA. Dan tidak bisa ada laporan keuangan jika tidak menggunakan aplikasi SAIBA tersebut. Standar dasar dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah adalah peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 270/PMK.05/2014 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Pusat. Untuk mendukung pelaksanaan akuntansi berbasis akrual di pemerintah pusat, Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengembangkan aplikasi akuntansi yang selama ini telah digunakan dalam basis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) yaitu Sistem Akuntansi Instansi menjadi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA).

Pemerintah sudah menggunakan basis akrual dalam penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan basis akrual dimaksudkan untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif. Sistem berbasis akrual bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Aplikasi yang sudah dibangun dan dipelihara selama ini telah mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akuntabel. Hal ini terbukti dengan hasil opini audit BPK yang menunjukkan

perkembangan positif dari tahun ke tahun. Aplikasi yang digunakan berupa aplikasi SAI yang terdiri dari SAK dan SIMAK-BMN termasuk Aplikasi Persediaan. Aplikasi-aplikasi tersebut mampu menghasilkan laporan finansial maupun laporan manajerial.



Gambar: 2.2 Kerangka Pemikiran

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variable yang lain. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti ini adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiono,2012:9).

Metode penentuan sampelnya menggunakan metode primer. Data primer dikumpulkan oleh peneliti yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk lebih jelasnya akan dituangkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Jenis, Metode dan Teknik Penelitian

Jenis/Bentuk Penelitian	Metode Penelitian	Teknik Penelitian
Deskriptif  (Kualitatif)	Deskriptif Survei	<ul style="list-style-type: none"><li>• Statistik Analisis Kualitatif</li></ul>

#### 3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

##### 3.2.1 Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kementerian LHK yang dimana pada saat keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor. 71 tahun 2010 itu LHK langsung menggunakan SAIBA untuk membuat laporan keuangan.

##### 3.2.2 Unit Analisis Penelitian

Unit analisis yang digunakan peneliti adalah Group. Group merupakan penelitian mengenai gabungan dari beberapa individual atau orang dalam suatu kelompok/bagian pada suatu organisasi, sehingga data adalah mengenai atau berasal dari (respon) kelompok atau bagian dalam suatu organisasi. Unit analisis yang diteliti adalah bagian akuntansi di Kementerian LHK.

##### 3.2.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah akuntan publik yang bekerja pada Kantor Kementerian LHK di Jakarta. Dengan pengambilan sampel menggunakan metode *primer*, yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama). Dalam penelitian ini adalah patner yang bekerja pada Kantor Kementerian LHK di Jakarta. Waktu penelitian dilakukan selama mulai Bulan Juli sampai dengan Agustus 2019.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang diteliti adalah data:

1. Kualitatif, yaitu merupakan data primer yang dilihat dari hasil penelitian pada KLHK.
2. Kualitatif, yaitu data yang berbentuk kalimat, kata atau gambar (Sugiyono,2011:23), data ini berupa profil KLHK

### 3.4 Operasionalisasi Variabel

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen.

1. Variabel Independen/Variabel Tidak Terikat/Variabel Bebas

Variabel Independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain, variabel yang diduga sebagai sebab dari variabel dependen dan sebagai variabel yang mendahului. adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah (X1) Sistem Akuntansi Intansi Berbasis Akrual dalam penyajian pelaporan keuangan pada Kementerian LHK

Tabel 3.2  
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dalam Penyajian Laporan Keuangan	1. Pelatihan penggunaan aplikasi SAIBA	1. modul pedoman penyusunan LK	1. Ordinal
	2. Komitmen Organisasi	2. Keinginan untuk bekerja keras	2. Ordinal
	3. ketepatan waktu penyusunan laporan	3. Syarat-syarat pelaporan yang baik	3. Ordinal

### 3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis melalui beberapa jenis metode pengumpulan data dan informasi, yaitu dengan cara penelitian data primer

yang bersumber dari laporan keuangan Kementerian LHK. Penelitian dilakukan untuk mendapatkan data dalam bentuk jadi atau teori dengan cara mempelajari, dan meneliti berbagai macam *literature*, seperti buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, yang berhubungan dengan variabel penelitian, laporan keuangan pemerintahan, skripsi serta data-data lainnya seperti:

1. Studi pustaka (*library research*) yaitu bentuk pengambilan data dengan cara membaca buku-buku yang ada hubungan dengan masalah yang dibahas.
2. Studi lapangan, penelitian ini dilakukan terhadap kegiatan dari seluruh objek penelitian yang meliputi:
  - 1) Observasi/survei yaitu kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut. Nantinya saya, akan membandingkan fakta-fakta yang ada di lapangan dengan teori.
  - 2) Wawancara yaitu dengan pengumpulan informasi dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak yang berkompeten dalam bidangnya, ditempat penelitian tersebut dilakukan.
  - 3) Dokumentasi, dilakukan dengan melakukan pengumpulan data-data historis atau dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini.

### 3.5.1 Jenis data yang yang digunakan

Data primer, data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data yang diambil data primer berupa data yang diperoleh secara langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

### 3.6 Metode Penarikan Sampel

Penelitian ini menggunakan sampel data primer dari lokasi penelitian menggunakan metode penarikan sampel nonprobabilitas dimana anggota populasi tidak memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel, meliputi: purposive atau judgment sampling yang memenuhi kriteria yang layak sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian ini menggunakan kriteria yang layak sesuai dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah menggunakan tiga kriteria, yaitu:

1. Orang yang bekerja di Kementerian LHK. Dimana dalam penelitian ini peneliti akan meneliti bagaimana pendapat orang yang bekerja di LHK ini yang menggunakan SAIBA
2. Orang yang membuat laporan keuangan atau *accounting*. Dalam kriteria penelitian ini peneliti akan meneliti laporan keuangan yang dibuat oleh orang yang ahli dalam menggunakan atau mengaplikasikan SAIBA

3. Orang yang mengaplikasikan SAIBA dan mengerti SAIBA. Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti bagaimana cara dalam menggunakan dan mengaplikasikan SAIBA terhadap orang yang mengaplikasikan SAIBA.

### 3.7 Metode Pengolahan atau Analisis Data

Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitan (Sugion,2012). Agar hasil dapat memberikan bukti yang meyakinkan, umumnya peneliti menggunakan teknik statistik menganalisis data penelitiannya. Teknik-teknik statistik yang digunakan tergantung pada konteks jawaban atau pemecahan masalah yang diinginkan dalam penelitian. Dalam menganalisis, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif (*nonstatistic*), yaitu merupakan data yang bersifat deskripsi, kata-kata bukan angka. Fenomena yang nampak ditanyakan, dikejar, dan dikembangkan lewat wawancara mendalam lewat informen lain dan wawancara lagi pada informen berikutnya sampai mendapatkan suatu tentang objek penelitian.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dalam penyajian laporan keuangan pada Kementerian LHK. SAIBA merupakan aplikasi penyajian laporan keuangan yang akrual. dengan menggunakan aplikasi SAIBA laporan keuangan dapat lebih komprehensif, dan lebih baik bagi para pemangku kepentingan baik para pengguna laporan keuangan dibandingkan dengan basis kas menuju akrual yang selama ini dianut.

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang digunakan adalah data sekunder mengenai analisis laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Teknik pengelolaan data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami karakteristik objek yang diteliti, atau menyusun profil objek, atau membantu membuat keputusan-keputusan sederhana seperti jumlah, proporsi, rata-rata, atau trend. Penelitian deskriptif kualitatif adalah menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis dengan kata-kata yang melatarbelakangi responden berperilaku seperti itu, direduksi, disimpulkan dan diverifikasi. Terdapat tiga macam kegiatan analisa data kualitatif yaitu:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lokasi penelitian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan lapangan oleh peneliti dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting.

2. Penyajian Data

Bertujuan untuk memudahkan peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Memberikan kesimpulan atas hasil analisis yang telah dilakukan.

4. Analisis Data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian. Analisis data juga dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi sebuah informasi baru yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan. Secara umum, tujuan analisis data adalah untuk menjelaskan suatu data agar lebih mudah dipahami, selanjutnya dibuat sebuah kesimpulan. Suatu kesimpulan dari analisis data didapatkan dari sampel yang umumnya dibuat berdasarkan pengujian hipotesis atau dugaan.
5. Analisis data secara deskriptif adalah teknik analisis yang digunakan dalam menganalisis data dengan membuat gambaran data-data yang terkumpul tanpa membuat generalisasi dari hasil penelitian tersebut. Beberapa yang termasuk di dalam teknik analisis data secara deskriptif misalnya menyajikan data ke dalam bentuk:
  1. Grafik
  2. Tabel
  3. Presentasi
  4. Frekuensi
  5. Diagram
  6. Dan lain-lain

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)**

##### **4.1.1 Latar Belakang Pembentukan Instansi**

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967, mengamanatkan bahwa pengurusan hutan pada hakekatnya adalah untuk mendapatkan manfaat hutan yang sebesar-besarnya secara serbaguna dan lestari baik secara langsung maupun tidak langsung, bagi kemakmuran masyarakat. Agar usaha-usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan pengurusan hutan tersebut secara administratif dan teknis dapat terselenggara dengan baik maka diperlukan adanya wadah atau sarana kelembagaan yang dapat menampung seluruh aktivitas kegiatan dibidang kehutanan.

Pada kurun waktu PELITA I (1971-1976) sampai dengan PELITA III (1980-1985), sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah pada waktu itu, kelembagaan yang menangani tugas-tugas atau kegiatan di bidang kehutanan berbentuk Direktorat Jenderal, yang secara administratif dan teknis berada di bawah Departemen Pertanian. Dalam pelaksanaannya, yang sejalan dengan semakin berkembangnya usaha-usaha lain dalam pembangunan nasional, pembangunan kehutanan menghadapi berbagai masalah/hambatan yang sangat kompleks. Apabila masalah dan hambatan tersebut tidak ditangani secara menyeluruh, tujuan pembangunan kehutanan akan dapat terganggu.

Jika usaha-usaha lain dalam pembangunan nasional semakin berkembang. Berbeda halnya dengan pembangunan kehutanan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan kehutanan sendiri menghadapi berbagai macam masalah atau hambatan yang sangat kompleks, yang apabila masalah dan hambatan tersebut tidak ditangani secara menyeluruh dengan baik, maka akan menghambat pembangunan kehutanan.

Instansi kehutanan yang setingkat Direktorat Jenderal dirasakan tidak mampu mengatasi permasalahan dan perkembangan aktivitas pembangunan kehutanan yang semakin meningkat. Instansi kehutanan yang setingkat dengan Direktorat Jenderal bahkan tidak mampu mengatasi permasalahan dan perkembangan yang ada dari aktivitas pembangunan kehutanan yang terus meningkat. Selain itu, hambatan secara administratif juga dapat mempengaruhi pelaksanaan dalam pembangunan kehutanan.

Beberapa hambatan secara administrative mempengaruhi pelaksanaan pembangunan kehutanan. Selain itu untuk mencapai tujuan pembangunan kehutanan diperlukan suatu pangkal tolak dan orientasi dengan cakrawala yang luas serta menyeluruh tentang hutan dan kehutanan, yang dalam pelaksanaannya mencakup aspek pemanfaatan, konservasi sumber daya alam hutandan rehabilitasi lahan.

Dari hal-hal tersebut, terbentuknya Departemen Kehutanan pada PELITA IV merupakan konsekuensi logis dari tuntutan keadaan dan perkembangan selama itu,



wadah baru setingkat departemen diharapkan mampu menampung permasalahan yang beranekaragam. Sedangkan pada bidang lingkungan hidup, pengelolaan dan pembangunannya relatif belum lama dan baru dirintis menjelang Pelita III. Namun demikian, dalam waktu yang pendek itu Indonesia telah banyak berbuat untuk mulai mengelola lingkungan hidupnya.

ingkungan hidupnya.

Hasil utama pengembangan lingkungan hidup ini nampak pada munculnya kesadaran dan kepedulian di kalangan masyarakat. Konsep dan kebijakan lingkungan hidup selama Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Pertama mengalami perkembangan yang sangat berarti. Selama Pelita III bidang lingkungan hidup ditangani oleh Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Men-PPLH) dengan prioritas pada peletakan dasar-dasar kebijaksanaan “membangun tanpa merusak”, dengan tujuan agar lingkungan dan pembangunan tidak saling dipertentangkan.

Pada Pelita IV, bidang lingkungan hidup berada di bawah Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (Men-KLH), dengan prioritas pada keserasian antara kependudukan dan lingkungan hidup. Pada Pelita V kebijaksanaan lingkungan hidup sebelumnya disempurnakan dengan mempertimbangkan keterkaitan tiga unsur, antara kependudukan, lingkungan hidup dan pembangunan guna mewujudkan konsep pembangunan berkelanjutan.

Kebijaksanaan dasar yang bertumpu pada pembangunan berkelanjutan ini akan tetap menjadi pegangan dalam pengelolaan lingkungan hidup pada Pelita VI dan pelita-pelita selanjutnya. Pada pelita VI, bidang lingkungan hidup secara kelembagaan terpisah dari bidang kependudukan dan berada di bawah Menteri Negara Lingkungan Hidup (Men-LH). Lingkungan hidup dirasakan perlu ditangani secara lebih fokus sehubungan dengan semakin luas, dan kompleksnya tantangan pada era industrialisasi dan era informasi dalam PJP Kedua (yang dimulai pada Pelita VI).

#### **4.1.2 Gambaran Umum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)**

Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup keduanya digabung menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berikut nama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebelum digabung.

##### **1. Lingkungan hidup**

1. Kementerian Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Kemeneq PPLH, 1978-1983)
2. Kementerian Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (Kemeneq KLH, 1983-1993)
3. Kementerian Negara Lingkungan Hidup (Kemeneq LH, 1993-2005)
4. Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen LH, 2005-2014).

## 2. Kehutanan

1. Direktorat Jendral Kehutanan, Departemen Pertanian (sampai dengan tahun 1983)
2. Departemen Kehutanan (1998-2005)
3. Kementerian Kehutanan (2005-2014).

Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 menyebutkan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya disebutkan pula bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Selain itu, Undang-undang juga mengamanatkan bahwa hutan merupakan karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Mandat tersebut merupakan landasan konstitusi dalam pengurusan dan pemanfaatan hutan di Indonesia yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan tersebut.

Saat ini kawasan hutan di Indonesia meliputi areal kurang lebih seluas 136,88 juta hektar, termasuk kawasan konservasi perairan. Sebagai negara yang terletak pada kawasan tropis dunia, hutan Indonesia yang berdasarkan penelitian terdiri dari 15 formasi hutan dimana sebagian besar didominasi oleh tipe hutan hujan tropis. Hutan tropis Indonesia dikenal sebagai tempat *megadiversity* sehingga menjadi pusat konsentrasi keragaman hayati, baik di daratan maupun perairan.

Hutan di Indonesia adalah habitat bagi kurang lebih 38.000 jenis tumbuhan termasuk 27.500 spesies tumbuhan berbunga (10% dari tumbuhan berbunga di dunia, yang separuhnya merupakan jenis endemik Indonesia), 515 spesies mamalia (12% jenis mamalia dunia), 511 spesies reptilia (7,3% dari jenis reptilia dunia), 270 spesies amphibia, 1.531 jenis burung (17% spesies burung dunia), 2.827 jenis binatang tak bertulang, kupu-kupu sebanyak 121 spesies (44% jenis endemik), serta lebih dari 25% spesies ikan air laut dan air tawar di dunia. Disamping itu, Indonesia memiliki tumbuhan palma sebanyak 477 spesies (47% endemik) dan kurang lebih 3.000 jenis spesies tumbuhan penghasil bahan berkhasiat obat. Diantara berbagai jenis tumbuhan dan satwa di atas beberapa diantaranya merupakan jenis-jenis yang baru ditemukan, terutama di kawasan-kawasan hutan di daerah Papua.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, telah menetapkan arah dan strategi pembangunan yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berangkat dari penetapan tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada

toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran utama Kementerian tahun 2015-2019 yang akan diusung, adalah:

1. Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim.
2. Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered spesies.
3. memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sasaran strategis ini akan menjadi panduan dan mendorong arsitektur kinerja tahun 2015-2019. Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah:

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan.
2. Memanfaatkan potensi Sumber daya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNB. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non-kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor.
3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspots kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon, dan lain-lain).

### **3. Tugas dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, KLHK menyelenggarakan fungsi, yaitu:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan dibidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
3. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan, pengelolaan keanekaragaman hayati, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
5. pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
6. pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
7. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KLHK;

8. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
10. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

#### 4.1.3 Struktur Organisasi

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Kehutanan dibagi menjadi 18 (delapan belas) Eselon I, yang terdiri dari 11 (sebelas) Eselon I teknis, 1 (satu) Eselon I pendukung dan 1 (satu) Eselon I pengawas intern, serta 5 (lima) Staf Ahli Menteri. Rincian Eselon I dan tugasnya adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1

Rincian Struktur Organisasi Eselon I Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Eselon I	Tugas
1.	Sekretariat Jenderal	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2.	Inspektorat Jenderal	Melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3.	Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	Merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan hutan produksi secara lestari.
4.	Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung	Merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang peningkatan daya dukung DAS dan hutan lindung.
5.	Direktorat Jenderal Konservasi SDA dan Ekosistem	Merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan ekosistem.
6.	Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan dan

	dan Tata Lingkungan	penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
7.	Badan Penelitian dan Pengembangan dan Inovasi	Menyelenggarakan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan termasuk penyebarluasan hasil-hasil penelitian, pengembangan dan inovasi kepada pengguna baik internal maupun eksternal.
8.	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Menyelenggarakan penyuluhan kehutanan dan pengembangan SDM lingkungan hidup dan kehutanan.
9.	Direktorat Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	Merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan, penanganan hutan adat, dan kemitraan lingkungan.
10.	Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan.
11.	Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim	Merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian perubahan iklim.
12.	Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya	Merumuskan serta melaksanakan dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengelolaan sampah, limbah, dan bahan beracun berbahaya.
13.	Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
14.	Staf Ahli (5 unit)	memberikan telaahan mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Setjen, Itjen, Ditjen, dan Badan.

Selanjutnya, ke-13 (tiga belas) Eselon I pada table 4.2 dibawah ini bertindak selaku entitas pelaporan tingkat Eselon I, dan terdiri dari entitas pelaporan tingkat Wilayah dan entitas akuntansi yang tersebar pada 34 (tiga puluh empat) provinsi di seluruh Indonesia. Pada tahun 2017, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki 335 satuan kerja (satker) yang terdiri dari 71 satker pusat dan 196 satker daerah. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga mengalokasikan Dana Dekonsentrasi pada 65 satker Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan. Dengan demikian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

memiliki 335 satker yang bertindak sebagai entitas akuntansi. Rincian jumlah satker per Eselon I sebagaimana tercantum pada tabel 4.2.

Tabel 4.2  
Rekapitulasi Jumlah Satker Menurut Eselon I

No	Kode EI	Uraian	Jenis Kewenangan				Jumlah
			Kantor Pusat (KP)	Kantor Daerah (KD)	Dana Konsentrasi (DK)	Tugas Pembantu (TP)	
1	1	Sekretariat Jenderal	12	6	58	-	76
2	2	Inspektoriat Jenderal	1	-	-	-	1
3	3	Ditjen PHPL	6	16	-	-	22
4	4	Ditjen PDASHL	6	36	-	-	42
5	5	Ditjen KSDAE	6	74	-	-	80
6	6	Ditjen Planologi	6	22	-	-	28
7	7	Badan Litbang	5	15	-	-	20
8	8	Badan P2SDM	5	12	-	-	17
9	9	Ditjen PSKL	5	5	-	-	10
10	10	Ditjen Gakum	5	5	-	-	10
11	11	Ditjen PPI	6	5	-	-	11
12	12	Ditjen PSLB3	1	-	-	-	1
13	13	Ditjen PPKL	7	-	-	7	14
TOTAL			71	196	58	7	332

Sumber: Laporan keuangan KLHK audited 2018

Terdapat beberapa kejadian penting pada Tahun 2018 terkait struktur organisasi Kementerian Kehutanan, yaitu:

1. Bertambahnya Satker Pusat sebanyak 15 Satker seiring diterbitkannya DIPA bagi beberapa Direktorat dan satker Dekonsentrasi/Tugas Perbantuan
2. Berkurangnya Satker/DIPA di lingkup Setjen dan Ditjen PSLB3 sebanyak 18 Satker/DIPA akibat tidak diterbitkannya lagi DIPA.

#### 4.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

Presiden Republik Indonesia telah mengarahkan visi dan misi pembangunan Tahun 2015-2019 yang dijadikan peta jalan seluruh kementerian dalam merancang arah pembangunan, sasaran dan strategi yang akan dilaksanakannya. Arah pembangunan Indonesia ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015. Visi pembangunan nasional Tahun 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian

Berlandaskan Gotong Royong”. Misi yang diemban untuk memenuhi visi yang telah dirumuskan adalah:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya Maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara Maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan,
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, telah menetapkan arah dan strategi pembangunan yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berangkat dari penetapan tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan SDA untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional. Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran utama Kementerian tahun 2015-2019 yang akan diusung, adalah:

1. Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim
2. Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta *endangered species*
3. memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sasaran strategis ini akan menjadi panduan dan mendorong arsitektur kinerja tahun 2015-2019. Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah:

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan.



2. Memanfaatkan potensi Sumber daya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNB. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor.
3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai system penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indicator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotpsot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon, dan lain-lain).

#### **4.2.1 Program Kegiatan**

Sejalan dengan proses restrukturisasi program dan kegiatan dalam kerangka reformasi perencanaan, dan berdasarkan sasaran yang ingin dicapai pada Renstra Tahun 2015-2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan Tiga belas program, yaitu:

1. Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem
2. Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung
3. Program Hutan Lestari dan Usaha Kehutanan
4. Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
5. Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan
6. Program Pengendalian Perubahan Iklim
7. Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
8. Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
9. Program Planologi dan Tata Lingkungan Hidup dan Kehutanan
10. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
11. Program Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya
12. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
13. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian

#### **4.3 Pembahasan**

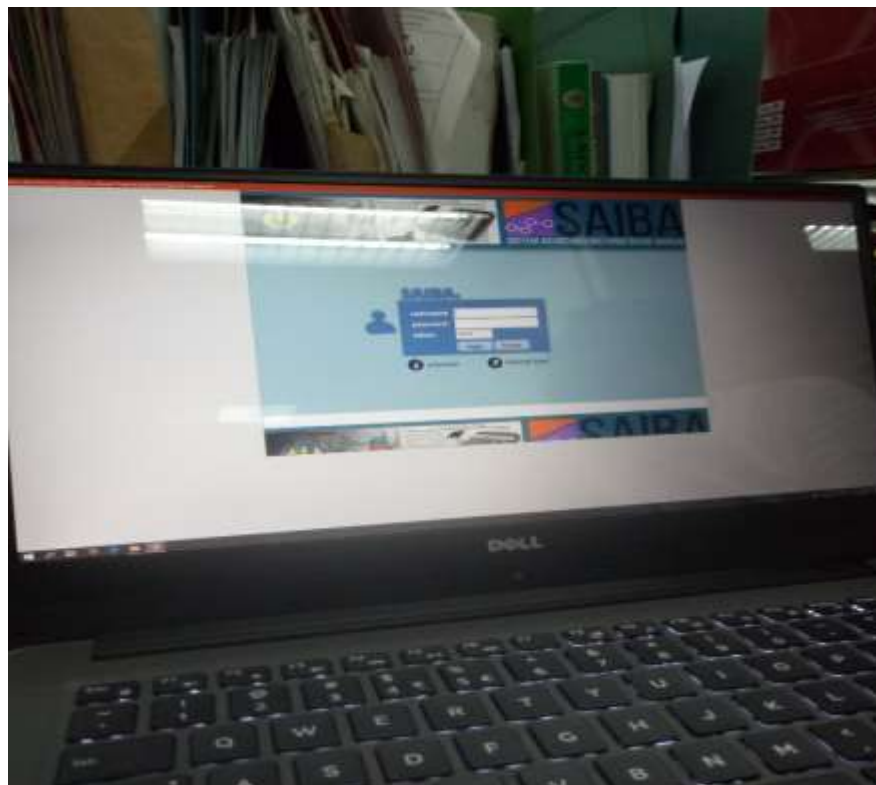
Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan KLHK. Laporan keuangan ini dihasilkan melalui aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara atau Lembaga.

Laporan keuangan disusun menggunakan aplikasi SAI, terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAIBA dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Negara atau Lembaga (LKKL) terdiri dari LRA, Neraca, LO dan LPE serta CALK. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Kementerian LHK telah menerapkan basis akrua dalam penyusunan dan penyajian Neraca, LO dan LPE. Basis akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan SAP yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP. Disamping itu, dalam penyusunan LKKL telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Dalam penerapan PP 71 tahun 2010 tentang SAP yang dimana adalah pengganti dari PP 24 tahun 2005. PP 71 tahun 2010 ini merupakan penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrua. Hal ini dimaksudkan agar mengharuskan keuangan Negara dikelola dengan baik, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab.

Berdasarkan PMK Nomor 270/PMK.05/2014 pasal 5 ayat 2. Laporan keuangan berbasis akrua disusun menggunakan SAIBA. SAIBA sudah mulai diperkenalkan pada satker-satker melalui training pada bulan Agustus 2014 dan resmi digunakan pada penyusunan laporan keuangan semester 1 Tahun Anggaran 2015. Berikut ini merupakan gambar tampilan aplikasi SAIBA yang digunakan untuk membuat laporan keuangan berbasis akrua:



Gambar 4.1 Tampilan aplikasi SAIBA versi 2019

#### 4.4 Analisi Data

Berdasarkan metode yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka data penelitian yang terkumpul dianalisis kemudian dideskripsikan dalam bentuk narasi atau kalimat. Data diperoleh dan dikumpulkan melalui beberapa cara yaitu melalui observasi secara langsung pada kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, melakukan wawancara kepada responden berjumlah 2 (dua) orang, yaitu staf akuntansi, yang bertugas dan berwenang dalam memberikan informasi terkait dengan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA). Adapun waktu penelitian dimulai pada bulan Juli 2019. Dimulai dari observasi langsung ke lapangan tentang fakta ataupun kegiatan yang terkait dengan proses penerapan SAIBA itu sendiri, mulai dari bagaimana cara penginputan transaksi pada aplikasi SAIBA hingga proses pembuatan laporan keuangan dan pelaporan keuangan atau disebut dengan kegiatan rekonsiliasi. Kemudian pada tanggal 8 Mei 2020 dilanjutkan dengan melakukan wawancara kepada staf akuntansi untuk menggali informasi lebih dalam terkait dengan penerapan SAIBA. Berikut tabel hasil penelitian:

Tabel 4.3  
Hasil Penelitian

No	Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Variabel yang diteliti: Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dalam penyajian laporan keuangan.	<p>Dari variabel tersebut maka peneliti dapat menghasilkan 3 (tiga) point indikator yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan penggunaan aplikasi SAIBA</li> <li>2. Ketepatan dalam posting</li> <li>3. Kebenaran dan ketepatan waktu penyusunan laporan</li> </ol> <p>Maka dari ketiga indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pelatihan SAIBA terhadap operator SAIBA dapat dilihat dari sumber daya manusia yang ada lebih cenderung bukan berlatar belakang akuntansi akan tetapi berlatar belakang kehutanan namun dengan adanya pelatihan SAIBA ini para satker dan operator SAIBA menjadi lebih dapat memahami aplikasi SAIBA ini. Dalam membuat laporan keuangan ini sangat dibutuhkan pegawai yang berlatar belakang akuntansi, dikarenakan untuk mencegah terjadinya salah saji terhadap laporan keuangan tersebut. Ketepatan dalam posting pun sangat berpengaruh bagaimana operator dalam menyajikan laporan keuangan, sehingga kebenaran dan ketepatan waktu yang digunakan pun menjadi lebih efektif karena dengan menggunakan aplikasi SAIBA dalam menyajikan laporan keuangan ini di bantu dengan aplikasi SIMAK-BMN, persediaan dan Erekon-LK, sehingga memudahkan operator dalam menjalankannya.</p>
2.	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan SAIBA dan sebelum menggunakan SAIBA dalam penyajian laporan keuangan pada KLH	<p>Dari tujuan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan SAIBA di KLHK ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu PP 71 tahun 2010. Untuk setiap pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran belanja negara harus dipertanggungjawabkan secara administrasi dengan kelengkapan bukti tagihan yang sah. Dan laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih efektif dan akurat, lebih dapat dipertanggungjawabkan dalam hal</p>

		<p>keakuratan dan transparansi data, lebih dapat dipercaya dan lebih terkontrol dalam segala sesuatunya dan ijin akses pun dapat terkendali, karena laporan keuangan ini sudah sangat transparan maka laporan keuangan ini sudah menghasilkan informasi yang jujur. Sedangkan laporan keuangan berbasis <i>Cash Towards Accrual</i> (CTA) ini belum memperlihatkan kinerja pemerintah secara keseluruhan, tidak menyajikan informasi keuangan yang sesungguhnya, dan kurang memberikan rekam jejak atas perubahan nilai ekuitas pemerintah. Karena dalam menjalankan aplikasi SAIBA ini sama dengan sebelum menggunakan SAIBA, sehingga diharapkan operator tidak kesulitan dalam menjalankan aplikasi ini. Dalam tujuan penelitian ini diharapkan dalam pengelolaan keuangannya sebagai bentuk peningkatan kualitas laporan keuangan demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.</p>
3.	Penerapan SAIBA dalam penyajian laporan keuangan	<p>Dari hasil penelitian yang diteliti bahwa laporan keuangan pada saat setelah menggunakan aplikasi SAIBA ini menjadi lebih meningkat signifikan dibandingkan dengan sebelum menggunakan SAIBA. Laporan keuangan yang tersaji pun menjadi lebih akurat dan lebih transparan, dan perubahan data menjadi lebih terkendali pada saat menggunakan aplikasi ini. Diantaranya tercermin dari opini BPK yang menunjukkan perkembangan positif dari tahun ke tahun. Dengan adanya pengakuan dari BPK merupakan citra yang baik untuk meningkatkan penilaian dan kepercayaan publik atas kualitas, kredibilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah serta mutu kinerja aparatur pemerintah. Laporan keuangan LHK pada saat sebelum menggunakan aplikasi SAIBA terlihat kurang efektif karena belum memperlihatkan kinerja pemerintah secara keseluruhan, tidak menyajikan informasi keuangan yang</p>

		<p>sesungguhnya, dan kurang memberikan rekam jejak atas perubahan nilai ekuitas pemerintah. Jika dibandingkan dengan setelah menggunakan aplikasi SAIBA lebih efektif dan akurat ketika menggunakan aplikasi SAIBA, dikarenakan sudah berbasis akrual karena dengan menggunakan aplikasi SAIBA ini dapat ditemukan kesalahan pencatatan atau transaksi karena aplikasi SAIBA ini dibantu dengan aplikasi SIMAK-BMN dengan menggunakan menu koreksi. Pada dasarnya aplikasi SAIBA ini merupakan pembaharuan dari aplikasi SAI, sehingga operator tidak kesulitan dalam menjalankan aplikasi SAIBA.</p> <p>Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memahami sistem untuk menyusun laporan keuangan belum sepenuhnya dimiliki oleh setiap Satker, kurangnya pegawai yang berlatarbelakang pendidikan ekonomi khususnya akuntansi, juga kurangnya kemauan untuk mengikuti pelatihan penggunaan SAIBA.</p> <p>Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pelatihan akuntansi berpengaruh terhadap implementasi akuntansi berbasis akrual. Semakin memadai pelatihan akuntansi yang dilakukan, maka semakin mendukung dan meningkatkan implementasi akuntansi berbasis akrual.</p>
--	--	---

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada KLHK mempunyai dua subsistem yaitu SAIBA yang penerapannya meliputi pelaksanaan terhadap penyusunan laporan keuangan dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) yang meliputi pelaksanaan transaksi pengelolaan aset negara. Dimana pada tingkat satuan kerja, untuk SAIBA pelaksanaannya dilakukan oleh tim unit akuntansi yang disebut tim UAKPA dan untuk SIMAK-BMN yang pelaksanaannya dilakukan oleh tim UAKPB. SAIBA dan SIMAK-BMN sebenarnya adalah dua sistem memiliki keterkaitan dimana Unit Akuntansi Barang memiliki kewajiban untuk menyusun laporan barang milik negara dalam rangka penyusunan laporan keuangan. Namun dalam penelitian ini akan lebih fokus membahas mengenai sistem yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan yaitu SAIBA. SAIBA ini diterapkan untuk mengikuti amanat pemerintah untuk menerapkan basis akrual dalam pelaporan keuangan yaitu PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. SAIBA diterapkan di KLHK mulai tahun 2015 yang menganut basis akrual dalam penyajian laporan keuangan.

Setiap entitas akuntansi wajib menyusun laporan keuangan secara periodik untuk digabungkan pada entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang lebih tinggi secara berjenjang. Proses pelaporan keuangannya dengan melakukan rekonsiliasi perbulan, triwulan dan pertahun. Setelah proses rekonsiliasi dilakukan, maka laporan keuangan tersebut telah dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai alat untuk pengawasan dan pengambilan keputusan bagi KLHK. Adapun isi dari laporan keuangan yang dihasilkan dari aplikasi SAIBA ini meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan ini berisi jumlah realisasi atau penggunaan APBN, ada tiga jenis sumber anggaran antara lain pendapatan negara, dana hibah, belanja dan pembiayaan.

2. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan ini menyajikan informasi kenaikan dan penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yaitu menjelaskan ekuitas awal, surplus/defisit -LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar, transaksi antar entitas, kenaikan/penurunan ekuitas.

3. Laporan Operasional (LO)

Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas, berupa pendapatan operasional, beban operasional, kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Namun pada instansi ini yang digunakan hanya beban operasional, karena anggaran hanya digunakan untuk jenis belanja. Laporan yang ditampilkan adalah perbandingan dari jumlah laporan tahun sebelumnya.

4. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Aset yang disajikan dalam neraca berupa aset lancar seperti persediaan yang berasal dari aplikasi Persediaan, aset tetap yang berasal dari hasil transfer aplikasi SIMAK-BMN, kewajiban yang berasal dari utang kepada pihak ketiga, dan ekuitas yang berasal dari nilai akhir laporan perubahan ekuitas.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Berisi catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan ke akhir laporan keuangan. CALK ini menjelaskan daftar rinci dan analisis dari seluruh rangkaian laporan keuangan selama satu tahun anggaran mulai dari LRA, LPE, LO, Neraca

#### **4.4.1 Penerapan SAIBA dalam laporan keuangan pada Kementerian LHK**

Pada tahun 2015 Kementerian Keuangan telah mengeluarkan aplikasi SAIBA yang berguna untuk menyusun laporan keuangan berbasis akrual dan mewajibkan semua Kementerian atau Lembaga Pemerintahan menggunakan aplikasi SAIBA. Maka dari itu, KLHK sejak awal tahun 2015 telah mulai menerapkan aplikasi SAIBA pada penyusunan laporan keuangannya. Pada saat diterapkannya SAIBA di

LHK, tanggapan pegawai LHK terutama pada Biro Keuangan ini awalnya merasa kebingungan dan tidak paham sama sekali apa itu akuntansi berbasis akrual, terutama pegawai yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi. walaupun aplikasi SAIBA yang dibuat cukup bagus dan sangat membantu. Pegawai KLHK juga perlu beradaptasi dengan aplikasi SAIBA ini, lalu melakukan penyesuaian terhadap jurnal-jurnal baru dan juga memahaminya.

Hal ini terjadi karena rata-rata pegawai LHK hanya berlatarbelakang kehutanan dan pada Biro Keuangan juga banyak pegawai yang berlatarbelakang kehutanan daripada Akuntansi. Maka dari itu sebenarnya aplikasi SAIBA dalam penyajian laporan keuangan ini sangat membantu pihak-pihak yang ada. Tetapi, aplikasi SAIBA hanyalah sebuah sistem. Jadi, dalam menyusun laporan keuangan masih memerlukan analisa dan telaah dari operator SAIBA untuk mencegah terjadinya salah saji terhadap laporan keuangan tersebut. Apabila dalam operator SAIBA itu sendiri mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi, maka operator SAIBA akan sangat membantu dalam menganalisa laporan keuangan yang dihasilkan.

Implementasi akuntansi akrual ini memerlukan SDM yang paham akan akuntansi. Namun tidak semua staf yang ada memiliki kemampuan akuntansi yang baik. Hal ini menjadi salah satu kendala untuk implementasi, maka dari itu untuk mengatasi tersebut diadakan pelatihan bagi semua staf keuangan. Selain berlatarbelakang akuntansi dibutuhkan seorang operator SAIBA yang berlatarbelakang Sistem Informasi agar lebih cepat tanggap dan lebih mudah memahami cara menggunakan aplikasi SAIBA ini. Jadi, tidak hanya mengerti akuntansi nya saja, akan tetapi sistem informasi pun harus mengerti agar dapat mengaplikasikannya dengan baik.

Aplikasi SAIBA ini disosialisasi oleh KLHK kepada pegawai dengan cara mengadakan kegiatan sosialisasi atau bimtek (bimbingan teknis) mengenai implementasi aplikasi SAIBA untuk para petugas penyusun laporan keuangan untuk tingkat satuan kerja, Eslon 1 lingkup KLHK dan juga dengan menerbitkan surat edaran kepada seluruh pimpinan satuan kerja untuk menginformasikan peraturan atau pedoman mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual yang berlaku saat ini.

Selain itu, untuk menguasai aplikasi SAIBA, KLHK mengadakan *training*, diklat, dan bimtek karena dalam pemahaman pengoperasiannya aplikasi ini membutuhkan waktu yang cukup lama, tidak hanya dalam waktu 1-2 hari melainkan lebih dari 1 minggu.

Persiapan yang dilakukan LHK dalam pelatihan akuntansi berbasis akrual ini yang utama yaitu mengajukan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pelatihan akuntansi berbasis akrual tersebut lalu menyusun jadwal acara kegiatan, menentukan narasumber dan materi yang perlu disampaikan selama kegiatan berlangsung. Sebelum tahun 2015 sudah diperkenalkan dengan sistem kas basis menjadi akrual basis, dimana diperkenalkan konsepnya terlebih dahulu serta bisnis aplikasi SAIBA tersebut. Jika konsepnya sudah diterima oleh para jajaran Kementerian, maka aplikasi SAIBA pun dapat diaplikasikan.



Penerapan SAIBA yang sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, nantinya untuk setiap pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran belanja negara harus dipertanggungjawabkan secara administrasi dengan melengkapi bukti tagihan yang sah, serta dalam pelaksanaan anggaran belanja negaranya harus sesuai dengan PMK Nomor 190 tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan jika ada ketentuan penerapan yang tidak sesuai, itu akan ditemukan oleh BPK RI dan selalu ada perbaikan SAIBA terbaru setiap tahunnya dari tahun 2015.

Pada saat pelatihan aplikasi SAIBA di KLHK dengan menggunakan metode rapat dengan mengundang para operator SAIBA sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas. Dimana diberikan pelatihan berupa modul praktek. Karena jika aplikasi ini, tidak diadakannya praktek pasti akan kurang paham dalam penerapannya. Maka dari itu agar aplikasi SAIBA ini dapat dipahami dan diterapkan dengan baik cara sosialisasinya yaitu dengan cara training dan bimtek lah yang digunakan dalam metode pelatihan aplikasi SAIBA di LHK.

Materi yang diberikan dalam pelatihan penggunaan aplikasi SAIBA ini juga sudah sesuai dengan PP Nomor 71 tahun 2010. Dikarenakan modul pelatihannya sudah disesuaikan dengan perkembangan aplikasi SAIBA yang berlaku saat ini dan sesuai dengan anjuran dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan selaku pengembang aplikasi SAIBA. Maka fungsi dari pelatihan SAIBA ini adalah untuk mempelajari fungsi-fungsi yang terdapat dalam aplikasi SAIBA, perkembangan atau *update* terkini dari aplikasi SAIBA, serta mempelajari kebijakan-kebijakan akuntansi atau *posting rules* SAIBA yang berlaku saat ini dan pengambilan keputusan yang dimana tujuannya untuk mempermudah proses penyusunan laporan keuangan.

Kementerian LHK ini dalam laporan keuangannya sudah mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 4 kali selama menggunakan aplikasi SAIBA dalam membuat laporan keuangan. Dalam penerapan SAIBA di LHK ini sudah sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010. Kendala yang dihadapi LHK dalam menggunakan aplikasi SAIBA ini pada awal pembaharuan tahun 2015-2016 yang awalnya menggunakan basis kas menjadi basis akrual, yang perubahannya sangat drastis, karena banyak aplikasi-aplikasi yang baru, serta salah satu kendalanya yaitu banyaknya satker yang dimiliki oleh Kementerian LHK yaitu 331 satuan kerja yang tersebar di seluruh provinsi di wilayah Indonesia dibutuhkan koordinasi yang cukup rumit dan waktu yang cukup lama dalam mengkonsolidasikan laporan keuangan seluruh satuan kerja sampai menjadi laporan keuangan Kementerian LHK yang memadai.

Cara untuk meminimalisir kesalahan aplikasi SAIBA ini dalam penginputan data ke aplikasi SAIBA dengan cara menginput data menggunakan ADK dan rutin melakukan rekonsiliasi internal setiap bulannya dengan operator SAS terkait realisasi belanja, serta dengan operator SIMAK-BMN terkait transaksi aset negara, sehingga data pada aplikasi SAIBA ini selalu update dan jika ada permasalahan dapat

terdeteksi sedini mungkin. Maka harus diperkuat dengan akuntansi di operator agar tidak salah dalam proses penginputannya, selain itu harus ada kontrol atau kendali dari petugas kementerian atau eslon 1 untuk melihat apakah yang diinput oleh petugas satker itu ada kesalahan atau tidak.

Dokumen yang dibutuhkan dalam penginputan data ke aplikasi SAIBA ini antara lain:

1. Arsip Data Komputer (ADK) dari aplikasi SAS untuk transaksi DIPA dan Revisi DIPA,
2. Dokumen Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) serta Bukti Penerimaan Negara (BPN) untuk transaksi Pendapatan Negara,
3. Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) serta Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk transaksi belanja negara,
4. Dokumen Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) untuk transaksi pengembalian belanja pada tahun anggaran yang sama,
5. ADK dari aplikasi SIMAK-BMN dan Persediaan untuk menerima data atas transaksi aset tetap, aset lainnya. dan Persediaan.
6. Memo Penyesuaian dari Kuasa Pengguna Anggaran untuk transaksi jurnal penyesuaian/akrual yang akan diinput pada aplikasi SAIBA

#### **4.4.2 Penyajian laporan keuangan pada saat sebelum menggunakan SAIBA dan setelah SAIBA**

Pada perkembangannya Aplikasi SAKPA ini mengalami perkembangan menjadi Aplikasi SAIBA yang mana hal tersebut untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan yang lebih baik dan mampu menyajikan laporan keuangan instansi pemerintah dengan menggunakan metode basis akrual. Aplikasi SAKPA ini diharapkan mampu memberikan pengaruh baik yang signifikan bagi pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran dalam mengelola anggaran di daerah atau di instansi pemerintahan terkait.

Pada pelaksanaannya, kuasa pengguna anggaran (KPA) bisa menerima pengalihan wewenang dari pengguna anggaran (PA) baik seluruhnya ataupun sebagiannya. Apabila KPA memperoleh wewenang secara penuh, maka KPA dimaksud dapat pula menyelesaikan sengketa antara kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana yang dilakukan oleh PA.

Dalam proses penerapan dan penyajian data yang dilakukan dengan aplikasi SAKPA kurang lebih sama dengan aplikasi SAIBA, hanya saja pada aplikasi SAKPA dalam menu tampilan datanya belum terperinci, hanya menyajikan LRA dan

Neraca saja. Saat setelah menggunakan aplikasi SAIBA lebih terperinci dalam penyajian data laporan keuangannya, terdiri dari LRA, Neraca, LPE dan LO serta CALK.

Kementerian LHK sendiri untuk laporan keuangannya sudah menggunakan pedoman dalam prosedur penerapan akuntansinya. Jika dilihat secara garis besar LHK ini sudah menggunakan pedoman PP Nomor 71 tahun 2010 dan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan (Bultek SAP). Bultek SAP ini merupakan informasi yang berisi penjelasan teknis akuntansi sebagai pedoman bagi pengguna, tidak hanya itu saja pedoman yang dipergunakan dalam prosedur penerapan akuntansi ini juga adalah dengan menggunakan pedoman PMK 225 Tahun 2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat.

Dalam penyajian laporan keuangan pada Kementerian LHK ini telah sesuai dan berpedoman pada PMK 222 tahun 2016 tentang Perubahan atas PMK 177 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian atau Lembaga. Untuk penyajian laporan keuangan terbagi kedalam 5 unsur yang dikemas menjadi satu yaitu laporan keuangan.

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Jenjang penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada Kementerian atau Lembaga adalah sebagai berikut:

1. UAKPA adalah unit terkecil penyusunan laporan keuangan, biasanya merupakan satuan kerja yang dikepalai oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) batasan UAKPA ini terkait dengan kode satuan kerja yang memperoleh Dokumen Isian Pengguna Anggaran (DIPA), baik itu satuan kerja dengan kode kewenangan Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah (KD), Dekonstrasi, Tugas Pembantu (TP), maupun Urusan Bersama (UB) yang biasanya berlokasi di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Wilayah (UAPPA-W) ini adalah unit yang mempunyai fungsi koordinator tingkat wilayah yang akan mengkompilasi laporan UAKPA di wilayah kerjanya. UAPPA-W ini dapat berupa Kantor Wilayah Instansi Vertikal, maupun Koordinator Tingkat Pemerintah Daerah.

3. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran – Eselon 1 (UAPA-E1), ini adalah unit setingkat Eselon 1 suatu Kementerian/Lembaga yang akan mengkompilasi laporan keuangan dari UAKPA dan UAPPA-W dibawahnya.
4. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA), ini adalah setingkat Menteri/Pimpinan Lembaga yang merupakan Entitas Pelaporan dengan kewajiban menyampaikan laporan keuangan kepada DPR dan laporan keuangan yang dihasilkan akan diberi opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan – Republik Indonesia (BPK-RI).

Pernyataan SAP No. 1 menjelaskan definisi laporan keuangan sebagai laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan Persyaratan minimal isi laporan keuangan. Entitas menerapkan pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan SAK. Pernyataan ini tidak berlaku bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas Syariah.

Laporan keuangan ini menggambarkan kondisi keuangan dari suatu perusahaan. Dimana laporan keuangan tersebut berasal dari hasil kegiatan operasional perusahaan untuk memberikan informasi keuangan. Menurut PSAK No. 1 (2015:1) Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.

Dokumen yang dibutuhkan dalam penginputan data ke aplikasi SAIBA ini antara lain:

1. Arsip Data Komputer (ADK) dari aplikasi SAS untuk transaksi DIPA dan Revisi DIPA,
2. Dokumen Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) serta Bukti Penerimaan Negara (BPN) untuk transaksi Pendapatan Negara,
3. Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) serta Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk transaksi belanja negara,
4. Dokumen Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) untuk transaksi pengembalian belanja pada tahun anggaran yang sama,
5. ADK dari aplikasi SIMAK-BMN dan Persediaan untuk menerima data atas transaksi aset tetap, aset lainnya, dan Persediaan.
6. Memo Penyesuaian dari Kuasa Pengguna Anggaran untuk transaksi jurnal penyesuaian/akrual yang akan diinput pada aplikasi SAIBA

Dalam proses penginputan SAIBA jika dilihat dari sisi Aset, didukung oleh aplikasi SIMAK-BMN maupun aplikasi persediaan. Setelah dari kedua aplikasi tersebut barulah dikirimkan datanya ke aplikasi SAIBA, hal ini cara untuk menginput persediaan dan aset. Jika proses penginputan akrual, seperti piutang, belanja bayar dimuka, pendapatan yang diterima maka proses penginputannya hanya melalui manual sistem. Jadi ada proses penginputan yang didukung dengan aplikasi yang lain

dan ada pula yang diinput secara manual. Ada pula Proses penginputan sebagian besar menggunakan ADK yang disimpan dalam bentuk *softcopy* pada media penyimpanan digital seperti *flashdisk* dsb, tapi ada juga yang harus diinput manual berdasarkan dokumen sumber yang ada dan sudah ada bukti laporan keuangannya dalam bentuk *softcopy* maupun *hardcopy*.

Laporan keuangan pada saat setelah menggunakan aplikasi SAIBA ini menjadi lebih meningkat signifikan dibandingkan dengan sebelum menggunakan SAIBA. Laporan keuangan yang tersaji pun menjadi lebih akurat dan lebih transparan, dan perubahan data menjadi lebih terkendali pada saat menggunakan aplikasi ini. Kendala yang biasa dihadapi pada saat proses penginputan data ini dalam aplikasi SAIBA sangat tergantung dari beberapa aplikasi yang lainnya (aplikasi SAS, SIMAK-BMN, Persediaan) yang belum terintegrasi langsung secara *online*, sehingga sangat berpotensi menjadi kendala dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu.

Laporan keuangan yang dihasilkan ini sudah tersusun dengan format yang digunakan merupakan format yang sangat sistematis sehingga sangat mudah untuk dimengerti. Selain itu dapat mempermudah juga bagi operator dalam proses penyajian laporan keuangan atau pengambilan keputusan. Dimana pada zaman sekarang itu merupakan zaman era globalisasi sangat transparan, yang dimana data-data laporan keuangan itu tidak hanya ada di KLHK saja akan tetapi ada di Kementerian Keuangan dan dapat mengaksesnya, bahkan Kementerian lain pun dapat melihatnya, karena sangat transparan akan data laporan keuangannya. Tetapi hanya bisa di akses melalui aplikasi khusus yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan yang memiliki wewenang untuk ijin akses.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan, bahwa KLHK sudah menerapkan aplikasi SAIBA sejak tahun 2015 untuk membuat laporan keuangan. Sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010, dimana pada tahun 2014 merupakan tahun terakhir menggunakan *cas basic*. Pada tahun 2015 pemerintah mewajibkan seluruh Instansi Pemerintahan menggunakan *accrual basic* dalam membuat laporan keuangannya.

Menurut penelitian Iput dyah Susanti, Muhammad Ahyarydin dan Muhammad Hidayat (2016), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan SAIBA dalam penyajian laporan keuangan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BNN Provinsi Riau telah menerapkan SAIBA mulai tahun 2015, laporan keuangan yang dihasilkan sudah menerapkan basis akrual yang penerapannya mengacu pada PMK 270/PMK.05/2014 dimana laporan keuangan yang dihasilkan telah dilengkapi dengan LPE dan LO, yang pada sistem sebelumnya hanya menghasilkan dua jenis laporan saja yaitu LRA dan Neraca. Kemudian untuk pelaporan tahunan laporan keuangan harus dilengkapi dengan CALK. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada penelitian ini kepada responden yang bertugas sebagai tim operator SAIBA telah menggambarkan bahwa penerapan SAIBA di BNN Provisi Riau ini telah mengikuti aturan dalam

Modul Proses Bisnis SAIBA pada PMK 270/PMK.05/2014, mulai dari melakukan migrasi saldo awal, yaitu melakukan pemindahan saldo akhir tahun yang lalu menjadi saldo awal di tahun 2015, kemudian perekaman dokumen sumber berupa dokumen DIPA dan dilanjutkan oleh proses perekaman transaksi berupa SPP, SPM dan SP2D. SPP dan SPM dibuat oleh pejabat penguji dan perintah pembayaran dibantu oleh staff bendahara.

Menurut penelitian Nidya Alyssa Astari (2018), tujuan penelitian ini menunjukkan bahwa secara empiris kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Hal ini dapat diartikan pula untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah cenderung dibutuhkan kompetensi SDM yang baik pula. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki, maka ada kecenderungan semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah. Dengan adanya pelaporan berbasis akrual, pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya. Akuntansi pemerintah berbasis akrual juga memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumber daya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumber daya tersebut, karena publik juga membutuhkan informasi yang transparan, akuntabilitas dan penilaian kinerja dalam penyajian laporan keuangan.

Menurut penelitian Fadilah Madjid (2016), penelitian ini menemukan bahwa kualitas sumber daya manusia memengaruhi penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, yang hasil penelitiannya mengemukakan bahwa kualitas sumber daya manusia sangat menunjang keberhasilan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Menurut penelitian Muhammad Indra Yudha Kusuma (2013), penelitian ini menemukan bahwa Tingkat penerapan akuntansi akrual pada pemerintah untuk tingkat satuan kerja masih sangat rendah. Faktor pelatihan yang diberikan kepada staf keuangan terkait penerapan akuntansi akrual berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat penerapan akuntansi akrual. Tingkat pendidikan staf keuangan, kualitas teknologi informasi, dukungan konsultan, pengalaman sebelumnya dalam menjalankan basis kas menuju akrual, pendidikan pimpinan dan ukuran satuan kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat penerapan akuntansi akrual.

Menurut penelitian Rizki Arvi Yunita (2019), penelitian ini menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang dengan penerapan SAIBA telah disusun sesuai PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Instansi Pemerintah berdasarkan PP 71 Tahun 2010 harus menerapkan akuntansi berbasis akrual oleh sebab itu sumber daya manusia sangat berperan dalam menjalankan fungsinya menyusun laporan keuangan.

Dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Iput dyah Susanti, Muhammad Aharydin dan Muhammad Hidayat (2016), Rizki Arvi Yunita (2019) dan mengacu pada penelitian Menurut penelitian Nidya Alyssa Astari (2018). penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan SAIBA dalam penyajian laporan keuangan pada KLHK. Bahwa penerapan SAIBA di KLHK ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, untuk setiap pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran belanja negara harus dipertanggungjawabkan secara administrasi dengan kelengkapan bukti tagihan yang sah. Laporan keuangan yang disajikan dengan menggunakan SAIBA ini menjadi lebih berkualitas, dan lebih dapat dipertanggungjawabkan dalam hal keakuratan dan transparansi data, sehingga lebih dapat dipercaya. Lebih terkontrol dalam segala sesuatunya, dan ijin akses pun terkendali. Karena laporan keuangan ini sudah sangat transparan maka laporan keuangan ini sudah menghasilkan informasi yang jujur.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan akuntansi berpengaruh terhadap implementasi akuntansi berbasis akrual. Semakin memadai pelatihan akuntansi yang dilakukan, maka semakin mendukung dan meningkatkan implementasi akuntansi berbasis akrual. Hasil ini sejalan dengan penelitian Muhammad Indra Yudha Kusuma (2013), Nidya Alyssa Astari (2018) yang menyatakan bahwa pelatihan terkait akuntansi akrual memberikan dampak dan pengaruh terhadap tingkat penerapan akuntansi akrual. pelatihan berguna untuk meningkatkan pemahaman tentang bagaimana merancang, menerapkan dan menggunakan suatu sistem. Dan SDM berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki, maka ada kecenderungan semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelatihan akuntansi yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman para operator aplikasi SAIBA selaku penyusun LKKL, merupakan langkah yang tepat dalam implementasi akuntansi berbasis akrual

Diadakannya pelatihan ini membuat SDM menjadi lebih kompeten dalam pengaplikasian aplikasi ini. Melihat masalah yang ada pada KLH ini dari SDM-nya yang masih kurang berlatar belakang akuntansi, maka diadakannya pelatihan aplikasi SAIBA, walaupun dalam pelatihan ini untuk memahaminya cukup membutuhkan waktu yang lama untuk benar-benar memahaminya. Dengan diadakannya pelatihan yang terus dilakukan sejak tahun 2015 sampai sekarang, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu dalam penyusunan laporan keuangan dan ketepatan waktu dalam posting pun sangat berpengaruh pada operator SAIBA untuk membuat pelaporan keuangan.

Dari aspek sumber daya, suatu kebijakan tidak dapat dilaksanakan apabila pelaksana kebijakan tidak memiliki sumber daya yang memadai. Sumber daya manusia merupakan aspek penting yang sangat diperlukan dalam menjalankan fungsi entitas dalam mencapai tujuannya. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan pada salah seorang informan yang merupakan operator SAIBA di kantor Kementerian LHK, dilihat bahwasanya dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu memahami sistem karena dalam penyusunan laporan keuangan, sistem yang digunakan saling terintegrasi. Sistem yang saling terintegrasi tersebut mengharuskan setiap aplikasi sinkron satu sama lain. Sehingga sumber daya manusia memang harus mampu

memahami prosedur dan alurnya. Salah satu faktor yang memudahkan proses untuk menyusun laporan keuangan melalui SAIBA adalah dengan menempatkan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi khususnya akuntansi. Namun juga tidak menutup kemungkinan bagi sumber daya manusia yang tidak memiliki latar belakang pendidikan ekonomi karena hal ini bisa diupayakan dengan mengikuti pelatihan yang diadakan oleh pemerintah ataupun yang diadakan secara internal oleh Kementerian LHK.

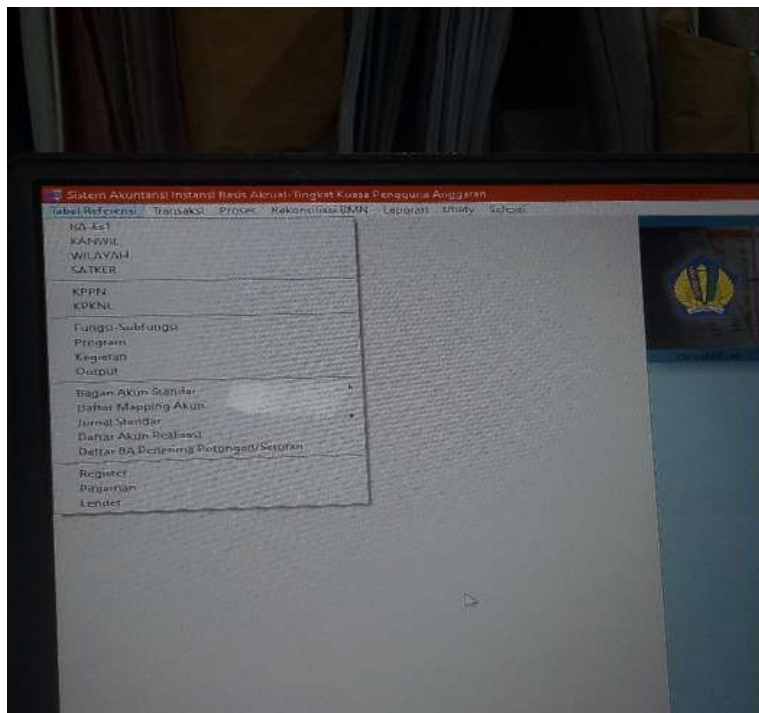
Karena Aplikasi ini dikembangkan dari Aplikasi SAKPA maka pola pengembangannya dimulai dari perekaman dokumen baik secara manual maupun secara terkomputerisasi dan akan membentuk jurnal transaksi, selanjutnya jurnal tersebut dilakukan posting ke buku besar dan diikhtisarkan dalam laporan keuangan. Dokumen sumber yang digunakan dalam SAIBA sebagian besar sama dengan dokumen akuntansi yang selama ini digunakan seperti: DIPA, Revisi DIPA, SPM/SP2D, Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Surat Setoran Pengembalian Belanja, dan Memo Jurnal penyesuaian.

Dalam proses perekaman data, aplikasi ini dapat menginput data ataupun mengimport data dari aplikasi lain seperti aplikasi SIMAK dan aplikasi SPM. Aplikasi SIMAK untuk mengimport data aset sedangkan aplikasi SPM untuk mengimport data Anggaran. Proses kegiatan mengimport data dan perekaman secara manual dilakukan oleh orang yang sudah ditunjuk dan mempunyai akses khusus untuk aplikasi ini, misalnya bendahara dan Pembuat Daftar Gaji. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan data dan hanya orang yang memiliki kapabilitas yang cukup untuk bisa menjalankan aplikasi tersebut.

Perubahan basis akuntansi dari kas menuju akrual menjadi akrual membawa dampak terhadap perubahan tahapan pencatatan dan jenis laporan keuangan yang dihasilkan. Dalam proses pelaporan penganggaran yang menghasilkan LRA tetap menggunakan basis kas, sedangkan untuk pelaporan keuangan lainnya tetap menggunakan basis akrual.

Mengingat sejak tahun 2005 sampai 2014 aplikasi SAI telah digunakan oleh Kementerian Negara atau Lembaga dalam menyusun laporan keuangannya, sehingga dapat dikatakan semua satuan kerja telah familiar dengan aplikasi tersebut. Pengembangan SAI yang menjadi SAIBA merupakan terobosan aplikasi akuntansi berbasis akrual yang diharapkan memenuhi kebutuhan informasi laporan keuangan yang disyaratkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAIBA ini juga dibangun sedemikian rupa sehingga diharapkan operator SAI, SAK dan SIMAK-BMN tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan aplikasi SAIBA ini.





Gambar 4.3 Tampilan aplikasi SAIBA

Laporan keuangan ini dihasilkan melalui aplikasi SAIBA yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara atau Lembaga. Tampilan aplikasi saiba ini terdiri dari beberapa menu:

1. Menu disamping tabel refesensi juga terdapat menu transaksi. Transaksi ini untuk menginput DIPA, belanja, pendapatan, jurnal dan semua transaksi diinput pada menu transaksi.
2. Menu proses, proses itu adalah saat setelah menginput transaksi lalu dieksekusi data tersebut melalui proses
3. Menu rekonsiliasi BMN. Rekonsiliasi BMN ini adalah menu yang dipergunakan untuk merekonsiliasi terkait dengan persediaan maupun aset.
4. Menu laporan, menu laporan ini yang menyajikan diantaranya neraca, belanja, pendapatan, LO, dan LPE
5. Menu utility. Utility ini sifatnya adalah proses mendukung pada pengiriman data, pembackup-an dan penerimaan data, dan
6. Menu selesai, dari setiap menu-menu yang ada pada aplikasi SAIBA ini mempunyai fungsi masing-masing.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Kementerian Lingkungan Hidup. Penelitian ini menggunakan data primer langsung dari KLHK Jakarta Pusat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi berbasis akrua dengan menggunakan aplikasi SAIBA pada KLHK. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Penyusunan laporan keuangan di kantor KLHK Jakarta Pusat berkaitan dengan penerapan SAIBA telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu PP 71 Tahun 2010.
2. Penyajian laporan keuangan pada saat menggunakan aplikasi SAKPA dalam menu tampilannya hanya terdapat LRA dan Neraca. Sedangkan saat setelah menggunakan aplikasi SAIBA sudah dilengkapi dengan LPE dan LO.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut, maka timbul saran sebagai bahan pertimbangan dan pengevaluasian untuk memperbaiki penerapan SAIBA di LHK. Adapun saran-saran ialah sebagai berikut:

##### **5.2.1 Bagi entitas pelaporan KLHK**

1. Memberikan sosialisasi beserta pelatihan secara berkala dan menyeluruh, mengingat masih banyak staf yang tidak berlatar belakang pendidikan akuntansi.
2. Pimpinan satuan kerja diharapkan lebih selektif dalam memilih operator aplikasi SAIBA. Pegawai yang dipilih menjadi operator aplikasi SAIBA sebaiknya pegawai yang memiliki latar belakang Pendidikan akuntansi dan minimal akuntansi dasar, serta mempunyai pemahaman terhadap Sistem Informasi karena dalam proses pembuatan laporan keuangan dibutuhkan analisis akuntansi untuk menganalisis laporan keuangan tersebut agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.
3. Lebih sering mengadakan bimtek tentang SAIBA, seperti pelatihan, training yang lebih ke teknis dalam prakteknya agar lebih mudah dipahami.
4. Sumber daya manusia harusnya bisa memanfaatkan adanya Bimtek yang memang rutin dilakukan minimal setahun sekali. Hal ini juga mencegah terputusnya ilmu tentang penyusunan laporan keuangan dengan aplikasi SAIBA.

##### **5.2.2 Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis**

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini hanya berdasarkan sebatas analisa yang diperoleh peneliti dari pendapat dan ungkapan dari hasil wawancara, pengamatan atau observasi dan dokumen berupa hasil laporan keuangan. Selanjutnya, penelitian ini hanya dilakukan pada salah satu instansi sehingga memiliki keterbatasan generalisasi. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya tentang akuntansi pemerintahan disarankan juga dilakukan pada instansi lainnya atau memperluas objek penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrarudin, K. E. (2016). Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaL Dalam Mewujudkan Good Governance Pemerintahan Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Mataram*, 6(2), 147–161.
- Akuntansi, J., & Ratulangi, U. S. (2018). Analisis Aplikasi E-Rekon-LK Terhadap Rekonsiliasi Laporan Keuangan Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(2), 693–704.
- Akuntansi, P., Daerah, K., & Hamzah, A. P. (2014). Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan SKPD.
- Alexander, S., Saerang, D., & Langelo, F. (2015). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1), 1–8.
- Arina, D. (2014). Laporan Keuangan Pemerintah Berbasis AkruaL Seminar Akuntansi Pemerintah. In *jurnal sekolah tinggi akuntansi negara*.
- Astuti Lindri Yuni. (2017). Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
- Christiani Natalia Dianne. (2013). Pengaruh Akuntansi Berbasis AkruaL dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
- Dkk, L. (2017). Seminar Akuntansi Pemerintahan Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah.
- Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., & Hasanuddin, U. (2015). Akuntansi sektor publik. In *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Ekonomika, F., Bisnis, D. A. N., & Diponegoro, U. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penerapan Akuntansi AkruaL Pada Pemerintah.
- Ekonomika, F., Bisnis, D. A. N., & Diponegoro, U. (2018). Implementasi Pelaporan Keuangan Berbasis AkruaL Pada Rumah Sakit Umum Daerah ( Studi Kasus pada RSUD Tugurejo Tahun 2018 ).
- Erawati, T., & Kurniawan, D. (2018). Penerapan sistem akuntansi berbasis akruaL: kajian dari aspek keperilakuan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 21(2), 313–332. <https://doi.org/10.24914/jeb.v21i2.1795>
- Eveline, F., (2016). Pengaruh SAP Berbasis AkruaL, Sistem Informasi Akuntansi, Kualitas SDM, Pengendalian Internal dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Bidang Nasional Penanggulangan Bencana. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi* Vol. 16 No. 1 April 2016
- Hanifatus'idah, Y., Diana, N., & Mawardi, C. M. (2019). Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 Mengenai Standar Akuntansi Basis

- Akrual Pada Pemerintah Kota Mataram. *E-Jra*, 08(01), 1–13.
- Herwiyanti, E., Sukirman, S., & Sufi Aziz, F. (2017). Analisis Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 19(1), 13–23. <https://doi.org/10.9744/jak.19.1.13-23>
- Indonesia, R. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. , (2010).
- Indra, M., & Kusuma, Y. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penerapan Akuntansi Akrual Pada Pemerintah. *Diponegoro Journal Of Accounting Http://Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Accounting*, 2(3), 1–14.
- Iskandar, A., Amriani, T. N., & Subekan, A. (2017). Evaluasi Atas Implementasi Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual (Saiba) Pada Mitra Kerja Kppn Gorontalo Dan Marisa. *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, 2(2), 111. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v2i2.65>
- Kuangan, M., & Indonesia, R. (2014). Modul Proses Bisnis Sistem Aplikasi Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (saiba).
- Kuangan, P. L. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1 (Revisi 2009) PSAK NO. 1 Penyajian Laporan Keuangan. , 01 § (2009).
- Kindangen D Wulan, T. M. M. P. (2018). Ipteks Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat*, 02(02), 533–536.
- Kiranayanti, I., & Erawati, N. (2016). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(2), 1290–1318.
- Kusuma Ririz Setiawati. (2013). Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jember).
- Lestari Dini. (2017). Analisis Penerimaan Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) Dengan Menggunakan Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) Pada Satuan Kerja Kementerian Agama Mitra Layanan KPPN Medan II. Universitas Sumatera Utara Repositori Institusi USU Departemen.
- Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Sektor Publik.
- Machfirah, N. (2016). Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik. *JIAM-Jurnal Ilmiah Akuntansi Mulawarman*, 1(1).
- Madjid Fadilah. Analisis penerapan akuntansi berbasis akrual di pemerintah daerah. , Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makasar § (2016).

- Musrifah Siti. (2015). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Jember. In *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*.
- Najati, I., & Pituringsih, E. (2017). Peran Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 12(1), 25–35.
- Najati, I., Pituringsih, E., & Animah. (2016). Impelemntasi Akuntansi Berbasis Akrual : Pengujian Determinan dan Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 14(1), 1–18.
- Penerapan, E., Pemerintah, P., Tahun, N., Runtuwene, S. K., & Gamaliel, H. (2019). Evaluasi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Dana Dekonsentrasi. *Jurnal Emba*, 7(71), 4504–4513.
- Permana, A. D. (2011). Penerapan Aplikasi SAIBA Untuk Penyusunan Laporan Keuangan. *Universitas Sebelas Maret Surakarta*, 65–77.
- Pituringsih, E. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Penerapan SAP Berbasis Akrual Dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu ). *Program Magister Akuntansi Universitas Mataram*, 3, 62–73.
- PP No 24 RI, P. *Pp No. 24 Thn 2015 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.* , (2004).
- Prasetyo, B. I. (2018). Hubungan Kegunaan dan Kemudahan Penggunaan SAIBA dengan Kualitas Laporan Keuangan Kantor Wilayah DJP Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 24, 1768–1798.
- Santriono Refki, R. R. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Vol. 4). <https://doi.org/1037//0033-2909.I26.1.78>
- Sinaga Jamason. (2005). Selamat datang standar akuntansi pemerintahan.
- Srimindarti, C. (2008). Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan. *Fokus Ekonomi*, 7(1), 14–21.
- Sofia Dora, “Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Studi Kasus Pada BPKD Kota Medan)” (Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas HKBP Nommensen Medan, 2014), h.25.
- Susanti, I. D., Ahyaruddin, M., & Hidayat, M. (2016). Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual ( Saiba ) Dalam Penyajian Laporan Keuangan ( Studi Kasus Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau ). *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau*, 1, 53–59.

Standar, P., Pemerintahan, A., Pada, A., Pusat, P, Pusat, P., Standar, Pusat, P. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.05/2016 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Pusat. (2016).

Zawitri, S., Kurniasih, N., & Kartikawati, T. S. (2015). Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI Sebagai Implementasi PP No. 71 Tahun 2010 pada Politeknik Negeri Pontianak. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 4(1), 24. <https://doi.org/10.26418/jebik.v4i1.11459>

**Internet :**

[Djpbk.kemenkeu.go.id](http://Djpbk.kemenkeu.go.id)

SAK Efektif Per 1 Januari 2018

<https://www.gurupendidikan.co.id/laporan-keuangan/>

<https://materibelajar.co.id/pengertian-laporan-keuangan-menurut-para-ahli/>

<file:///D:/data%20magang/tentang%20saiba/analisis%20SAIBA%20terbaru.pdf>

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifa Aulia Suherman  
Alamat : Kp. Sindang Palay Rt05/06 Desa Pasawahan  
Kec. Cicurug Kab. Sukabumi  
Tempat dan Tanggal Lahir : Sukabumi, 17 September 1997  
Umur : 23 Tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan :  
• SD : SDN 2 CICURUG  
• SMP : SMP PGRI 1 CIGOMBONG  
• SMK : SMAN 1 CARINGIN  
• Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS PAKUAN

Bogor, Januari 2021

Peneliti

(Rifa Aulia Suherman)



# LAMPIRAN

## **Lampiran**

### **DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

Daftar pernyataan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “**Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**”. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah bagaimana penerapan SAIBA dalam penyajian laporan keuangan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

#### **Identitas Responden**

Nama Responden : Ivan Simbolon

Nama Jabatan : Analis Data Akuntansi

Tahun Awal Bekerja : 2011

Alamat : Perumahan Villa Merdeka No.2 RT 02 / RW 07  
Kel. Kedung Waringin Kec. Tanah Sareal Bogor

Jenis Kelamin : (  ) Laki-Laki  
(  ) Perempuan

Pendidikan Responden : (  ) SD/MI  
(  ) SMP/MTS  
(  ) SMA/MA/SMK/MAK  
(  ) S1/S2/S3  
(  ) Lainnya

#### **A. Pelatihan Penggunaan Aplikasi SAIBA**

1. Apakah penerapan SAIBA telah ditetapkan di LHK? Dan sejak tahun berapa?

Jawab: Sudah, penggunaan Aplikasi SAIBA dimulai sejak awal tahun 2015

2. Bagaimana tanggapan pegawai LHK pada saat ditetapkannya SAIBA?

Jawab: Tanggapan pegawai pada awalnya bingung dan tidak paham sama sekali apa itu akuntansi berbasis akrual, terutama pegawai yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi.

3. Bagaimana cara sosialisasi di Kementerian LHK terhadap pegawai tentang aplikasi SAIBA?

Jawab: Dengan mengadakan kegiatan sosialisasi/bimtek implementasi aplikasi sistem akuntansi instansi berbasis akrual untuk para petugas penyusun laporan keuangan tingkat satuan kerja, dan eselon 1 lingkup KLHK dan juga dengan menerbitkan surat edaran kepada seluruh pimpinan satuan kerja untuk menginformasikan peraturan/pedoman mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual yang berlaku saat ini.

4. Bagaimana persiapan yang dilakukan LHK dalam pelatihan akuntansi berbasis akrual ini?

Jawab: Persiapan yang utama yaitu mengajukan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pelatihan akuntansi berbasis akrual tersebut, menyusun jadwal acara kegiatan, menentukan narasumber dan materi yang perlu disampaikan selama kegiatan berlangsung.

5. Bagaimana penerapan yang dilakukan LHK akuntansi berbasis akrual ini?

Jawab: Penerapan SAIBA dimulai dengan cara di kenalkan dahulu ke tingkat Kementerian, lalu ke eselon 1 dan setelah tingkat Kementerian dan eselon 1 menguasai aplikasi tersebut lalu ke satker-satker dan bekerja sama dengan KPPN setempat.

6. Apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada? Besertakan contohnya

Jawab: Sudah, untuk setiap pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran belanja negara harus dipertanggungjawabkan secara administrasi dengan kelengkapan bukti tagihan yang sah, serta dalam pelaksanaan anggaran belanja negaranya telah sesuai dengan PMK Nomor 190 tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

7. Bagaimana peranan latar belakang pendidikan terhadap operator SAIBA?

Jawab: Sangat berperan, dikarenakan walaupun menggunakan aplikasi dalam menyusun laporan keuangan, namun tetap memerlukan analisa dan telaah dari operator SAIBA untuk mencegah terjadinya salah saji terhadap laporan keuangan tersebut. Dan operator SAIBA yang mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi akan sangat membantu dalam menganalisa laporan keuangan yang dihasilkan

8. Bagaimana kemampuan sumber daya manusia dalam penerapan SAIBA sebagai implementasi PP 71 tahun 2010 dalam penyusunan laporan keuangan di LHK?

Jawab: Saat ini kemampuan sumber daya manusia dalam penerapan SAIBA sudah semakin baik dan sudah cukup menguasai dalam implementasi akuntansi berbasis akrual dibandingkan ketika diawal penerapannya.

9. Pada LHK ini saat pelatihan aplikasi SAIBA menggunakan metode pelatihan yang seperti apakah?

Jawab: Saat ini pelatihan SAIBA di KLHK menggunakan metode rapat dengan mengundang para operator SAIBA sebagaimana dijelaskan diatas.

10. Apakah materi pelatihan penggunaan aplikasi SAIBA ini sudah sesuai dengan PP No 71 tahun 2010?

Jawab: Sudah, dikarenakan modul pelatihannya sudah disesuaikan dengan perkembangan aplikasi SAIBA yang berlaku saat ini dan sesuai dengan anjuran dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan selaku pengembang aplikasi SAIBA.

11. Bagaimana fungsi dari pelatihan tentang SAIBA?

Jawab: Fungsi dari pelatihan SAIBA yaitu untuk mempelajari fungsi-fungsi yang terdapat dalam aplikasi SAIBA, perkembangan/*update* terkini dari aplikasi SAIBA, serta mempelajari kebijakan-kebijakan akuntansi/ *posting rules* SAIBA yang berlaku saat ini.

12. Apakah Penerapan SAIBA di LHK sudah sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010?

Jawab: Sudah, Kementerian LHK sudah menerapkan penggunaan Aplikasi SAIBA sesuai dengan peraturan yang berlaku.

13. Apakah ada kendala yang dihadapi di LHK dalam menggunakan SAIBA?

Jawab: Ada, salah satu kendalanya yaitu banyaknya satuan kerja yang dimiliki oleh Kementerian LHK yaitu 331 satuan kerja yang tersebar di seluruh propinsi di wilayah Indonesia. Dibutuhkan koordinasi yang cukup rumit dan waktu yang cukup lama dalam mengkonsolidasikan laporan keuangan seluruh satuan kerja sampai menjadi laporan keuangan Kementerian LHK yang memadai.

14. Bagaimana cara untuk meminimalisir kendala dalam pengaplikasian SAIBA?

Jawab: Operator SAIBA agar selalu berkoordinasi dengan Operator SPM, Bendahara, Operator SIMAKBMN dan Persediaan untuk melakukan rekonsiliasi transaksi keuangan maupun transaksi BMN setiap bulannya.

## **B. Ketepatan Dalam Posting**

15. Apakah dalam laporan keuangan yang sudah menggunakan SAIBA lebih efektif dan efisien?

Jawab: Belum, dikarenakan aplikasi SAIBA bukanlah aplikasi berbasis internet/online, dan belum terintegrasi langsung secara online dengan aplikasi pendukung laporan keuangan yang lainnya, seperti aplikasi SIMAK-BMN, aplikasi Persediaan, dan aplikasi SAS.

16. Bagaimana proses penginputan data ke SAIBA?

Jawab: Proses penginputan sebagian besar menggunakan Arsip Data Komputer (ADK) yang disimpan dalam bentuk softcopy pada media penyimpanan digital seperti flashdisk, dsb, tapi ada juga yang harus diinput manual berdasarkan dokumen sumber yang ada.

17. Apa saja dokumen yang diperlukan dalam penginputan data ke SAIBA?

Jawab: Dokumen yang diperlukan dalam penginputan data di SAIBA antara lain:

- a. ADK dari aplikasi SAS untuk transaksi DIPA dan Revisi DIPA,
- b. Dokumen Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) serta Bukti Penerimaan Negara (BPN) untuk transaksi Pendapatan Negara,
- c. Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) serta Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk transaksi belanja negara,
- d. Dokumen Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) untuk transaksi pengembalian belanja pada tahun anggaran yang sama,
- e. ADK dari aplikasi SIMAKBMN dan Persediaan untuk menerima data atas transaksi aset tetap, aset lainnya, dan Persediaan.
- f. Memo Penyesuaian dari Kuasa Pengguna Anggaran untuk transaksi jurnal penyesuaian/akrual yang akan diinput pada aplikasi SAIBA.

18. Apakah ada bukti laporan keuangannya? Ada

19. Bagaimana cara meminimalisir kesalahan penginputan data ke aplikasi SAIBA?

Jawab: Dengan menginput data menggunakan ADK dan rutin melakukan rekonsiliasi internal setiap bulannya dengan operator SAS terkait realisasi belanja, serta dengan operator SIMAK terkait transaksi aset negara, sehingga data pada Aplikasi SAIBA selalu update dan jika ada permasalahan dapat terdeteksi sedini mungkin.

20. Apakah ada peningkatan yang signifikan antara setelah menggunakan SAIBA dengan tidak?

Jawab: Ada, laporan keuangan yang tersaji lebih akurat dan lebih transparan.

21. Apa hal yang menjadi kendala yang biasa dihadapi dalam menginput data?

Jawab: Data dalam aplikasi SAIBA sangat tergantung dari beberapa aplikasi yang lainnya (aplikasi SAS, SIMAKBMN, Persediaan) yang belum terintegrasi langsung secara *online*, sehingga sangat berpotensi menjadi kendala dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu.

### **C. Kebenaran dan Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan**

22. Apa pedoman yang digunakan dalam prosedur penerapan akuntansi?

Jawab: Pedoman yang dipergunakan dalam prosedur penerapan akuntansi adalah PMK 225 Tahun 2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat.

23. Bagaimana penyajian Laporan Keuangan pada Kementerian LHK?

Jawab: Penyajian Laporan Keuangan pada Kementerian LHK telah sesuai dan berpedoman pada PMK 222 tahun 2016 tentang Perubahan atas PMK 177 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian / Lembaga.

24. Apakah laporan keuangan yang dihasilkan telah disusun secara sistematis sehingga mudah dimengerti?

Jawab: Sudah, format penyajian Laporan Keuangan pada Kementerian LHK berpedoman pada PMK 222 tahun 2016 tentang Perubahan atas PMK 177 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian / Lembaga.

25. Apakah laporan keuangan yang dihasilkan telah menghasilkan informasi yang jujur?

Jawab: Sudah, dikarenakan beberapa aspek informasi dalam laporan keuangan seperti data realisasi Pendapatan dan Belanja Negara harus direkonsiliasikan setiap bulan dengan pihak eksternal yaitu dengan Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN), dan adanya pemeriksaan dan penilaian atas kualitas laporan keuangan oleh BPKRI setiap tahunnya.

26. Apakah LHK telah menyediakan informasi yang mampu memprediksi masa yang akan datang?

Jawab; Belum ada

27. Apa dampak yang ditimbulkan setelah menggunakan aplikasi SAIBA pada laporan keuangan?

Jawab: laporan keuangan lebih berkualitas, dan lebih dapat dipertanggungjawabkan dalam hal keakuratan dan transparansi data, sehingga lebih dapat dipercaya.

28. Bagaimana waktu yang digunakan dalam menggunakan SAIBA terhadap laporan keuangan sudah efektif atau tidak?

Jawab: Sudah, tidak ada batasan waktu untuk menggunakan SAIBA, sehingga dapat digunakan kapan saja untuk mempersiapkan penyusunan laporan keuangan.

29. Apakah dalam penyajian laporan keuangan memerlukan waktu lama untuk membuatnya?

Jawab: Cukup lama, dari mulai proses konsolidasi laporan keuangan di tingkat satuan kerja, eselon 1, serta Kementerian sampai dengan penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan membutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan.

30. Apakah SDM yang mengerjakannya harus professional?

Jawab: Harus, karena laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban atas anggaran yang dikelola dari suatu instansi dan harus dipertanggungjawabkan oleh pimpinan instansi tersebut.

### **Dokumentasi Wawancara**

